

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR
PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP
KEMISKINAN DI PROPINSI LAMPUNG**

(Tesis)

Oleh

Deris Desmawan



**PASCASARJANA ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDARLAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DI PROPINSI LAMPUNG

Oleh

DERIS DESMAWAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bukti empiris tentang pengaruh Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung, untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung, untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung. Data yang digunakan adalah data sekunder yang disusun dari tahun 1994 hingga tahun 2013. Alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda metode *Ordinary Least Square* (OLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung, pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung.

Kata Kunci: Jumlah penduduk miskin, OLS, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan.

EFFECT OF GOVERNMENT EXPENDITURE SECTORS OF EDUCATION
AND HEALTH ON POVERTY
IN LAMPUNG PROVINCE

By DERIS DESMAWAN

This research aims to know empirical evidence about the influence for knowing the effect of government expenditure sector of education term Poor people in Lampung Province, and know effect of government expenditure health sector term Poor people in Lampung Province, to know the effect of Government expenditure sector of health and Education period Against Poor People in Lampung province. The data used is secondary data composed From 1994 To 2013. The analysis tool used is regression Ordinary Least Square method (OLS). The research shows that Government expenditure of Education Sector is negative effect against term poor people in Lampung province. Government expenditure of the health sector is negatively impact against term poor people in Lampung province, government expenditure sector education and health operate together influential period to poor people in Lampung province.

Keywords: Term of the Poor, OLS, government expenditure sector of education, government expenditure sector of health.

**ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR
PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP
KEMISKINAN DI PROPINSI LAMPUNG**

Oleh

DERIS DESMAWAN

Draf Tesis

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
MAGISTER SAINS**

Pada

**Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung**



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

Judul Tesis

**: ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN
PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN
SEKTOR KESEHATAN TERHADAP
KEMISKINAN DI PROPINSI LAMPUNG**

Nama Mahasiswa

: DERIS DESMAWAN

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1121021002

Program Studi

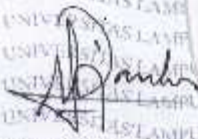
: Magister Ilmu Ekonomi

Fakultas

: Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung

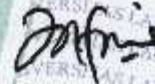
MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing



Dr. M. Faddel Djauhar, S.E.

NIP 130351143



Emi Maimunah, S.E., M.Si.

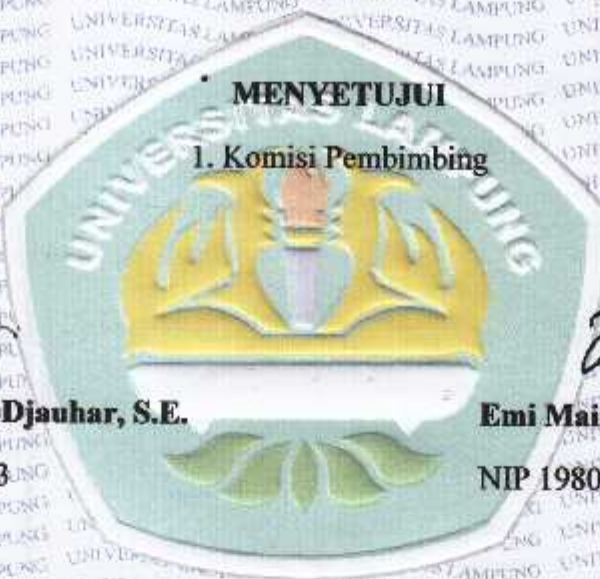
NIP 19800218 200501 2 002

2. Ketua Program Pascasarjana Ilmu Ekonomi



Dr. I Wayan Suparta, S.E., M.Si.

NIP 19611209 198803 1 003



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. M. Faddel Djauhar, S.E.

Sekretaris : Emi Maimunah, S.E., M.Si.

Penguji

Bukan Pembimbing : Dr. Hi. Toto Gunarto, S.E., M.Si.

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Hi. Satria Bangsawan, S.E., M.Si
NIP. 1961 0904 198703 1011

3. Direktur Program Pascasarjana

Prof. Dr. Sudjarwo, M.S.
NIP. 1953 0528 198103 1 002

4. Tanggal Lulus Ujian Tesis : Januari 2014



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT PROGRAM MAGISTER ILMU EKONOMI

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik magister, baik di Universitas Padjajaran maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam Daftar Pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia mendapat sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Bandung, Nopember 2016

Yang membuat pernyataan,



Deris Desmawan, S.E.

NPM. 1121021002

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan pada tanggal 13 Desember 1986 di Pandeglang, putra kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Drs. Deddy Supriady, M.Pd dan Ibu Bai Afiah, S.Pd.

Pendidikan yang telah diselesaikan oleh penulis (1)Taman Kanak-kanak (TK) Tuturi Handayani Tanjung Karang Pusat, pada tahun 1992, (2)Sekolah Dasar (SDN) 2 Palapa, Tanjung Karang Pusat pada tahun 1999, (3)Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri (SLTP) di SLTPN 8 Tanjung Karang Pusat pada tahun 2002, (4)Sekolah Menengah Umum (SMU) di SMUN 7 Bandar Lampung pada tahun 2005.

Pada tahun 2005, penulis terdaftar sebagai mahasiswa reguler pada program studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Bengkulu melalui jalur SPMB. Pada tahun 2006, penulis melanjutkan studi sebagai mahasiswa reguler program studi Ilmu Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Lampung melalui jalur konversi. Penulis telah melaksanakan Kuliah Kunjungan Lapangan (KKL) di Bank Indonesia, OCBC NISP, Bank Mandiri sebagai pengganti mata kuliah kerja nyata(KKN).

Pada tahun 2010 penulis diterima sebagai pegawai kontrak di UPT bahasa Universitas Lampung. Tahun 2011 penulis terdaftar sebagai Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Ekonomi Universitas Lampung.

MOTTO

*Allahlah yang menciptakan tujuh langit dan seperti itulah bumi,
perintah Allah berlaku padanya, agar kamu mengetahui bahwasannya
Allah maha kuasa atas segala sesuatu, sesungguhnya Allah ilmunya
benar-benar meliputi segala sesuatu. (Q.S: ath Thalaq 12)*

HALAMAN PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya ini untuk:

Papa, Mama, yang aku cintai dan kusayangi, untuk kakak-kakakku, Ginda Yeyen dan Ginda Wawan, Daing Aris dan Ses Yuli, Payan Gita, untuk adikku-adikku, Shinta, Deni, Tita ici dan Adin Quba, Hoya Rian, untuk Istriku Grestiana dan teman-teman yang tak bisa aku sebutkan satu-persatu, kalian yang selalu membantuku dan mendo'akanku.

Terimakasih untuk orang-orang yang aku sayangi yang memberikan aku semangat dan do'a-do'anya dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan bimbingannya.

Tiada balasan yang maha sempurna selain balasan dari Allah SWT.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr.Wb

Alhamdulillahirobbilalamin, pujisyukurpenulispanjatkankehadirat Allah SWT. Berkatrahmatdanhidayah-Nya sehinggaPenulisdapatmenyelesaikanSkripsi yang berjudul "ANALISIS PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN DAN SEKTOR KESEHATAN TERHADAP KEMISKINAN DIPROPINSI LAMPUNG.

PenulisanTesisinitidakmungkin dapatdiselesaikantanpaadanyabantuandariberbagai pihak, baikbantuandalambentuksumbanganpemikiran, motivasimaupunmateri.

Dalamkesempataninipenulismengucapkanterimakasihkepada:

1. Bapak Prof. Dr. SatriaBangsawan, S.E., M.Si.,selakuDekanFakultasEkonomiUniversitas Lampung.
2. Bapak Dr. I WayanSuparta, S.E., M.Si. selakuKetuaJurusanPascasarjanaIlmuEkonomiFakultasEkonomiUniversitas Lampung.
3. Bapak.Dr. M.FaddelDjauhar, S.E. selaku DosenPembimbing yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, serta memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini

4. Ibu Emi Maimunah, S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, serta memberikan saran dan masukan dalam penyusunan tesis ini
5. Bapak Dr. Toto Gunarto, S.E., M.Si. selaku dosen pembahas yang telah membantu, mengarahkan, serta memberikan saran dan masukan dalam penyusunan Tesis ini
6. Bapak Prof. Dr. Sahala Panjaitan, Msc. selaku dosen Pembimbing Akademik atas segala arahan yang telah diberikan kepada penulis selama masa studi.
7. Seluruh Dosen FE UNILA, terimakasih atas segala pendidikan dan ilmu yang bermanfaat.
8. Segenap Staf Administrasi Magister Ilmu Ekonomi, Ibu Mardiana, S.Pd, Mas Kuswara, Mbak Sri dan staf-staf lainnya yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
9. Segenap Staf UPT Bahasa UNILA, Ibu Eli Zahara, S.Sos dan staf-staf lainnya yang telah memberikan bantuan kepada penulis.
10. Untuk seseorang yang selalu ada dalam hatiku yang selalu memberikan dukungan, semangat, tenaga, dan harapan
11. Teman-teman penulis : Yudha, bang Sentri, mba Ekita, bang Rizal, bang Agung, Dwi, Tanti serta teman-teman yang tidak bisa disebutkan satu-persatu terimakasih atas dorongan, perhatian, dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
12. Teman-teman penulis di masa perguruan tinggi hingga sekarang : angkatan 2011, 2012 terimakasih atas dorongan, perhatian, dan kebersamaan yang tidak terlupakan.
13. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung demi terselesainya tesis ini. Penulis tidak dapat memberikan apa-apa kecuali balasan dari Allah S.W.T.

Akhir kata, Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi dengan harapan semoga tesis yang sederhana ini dapat berguna dan bermanfaat bagi kita semua, Amiin

Bandar Lampung, Nopember 2016
Penulis

Deris Desmawan, S.E.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
ABSTRACT	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
RIWAYAT HIDUP.....	x
MOTTO	xii
PERSEMBAHAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR ISI GAMBAR	xvi
DAFTAR ISI LAMPIRAN.....	xvii
 BAB IPENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Masalah Penelitian	8
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Penelitian Terdahulu	9
1.5 Kontribusi Penelitian.....	10
1.6 Kerangka Pemikiran.....	11
1.7 Hipotesis Penelitian.....	13
 BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Definisi Kemiskinan.....	15
2.2 Pendekatan Dalam Studi Kemiskinan.....	23
2.3 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan.....	24
2.4 Teori Pengeluaran Pemerintah	30
2.5 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah.....	37
2.6 UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 dan UU No 36 tahun 2009 Pasal 171 Tentang Pengalokasian Dana Pendidikan dan Kesehatan	40
2.7 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Michael P Todaro.....	41
2.8 Pembangunan Ekonomi: Tindakan-Tindakan Domestik	43
2.9 Model Human Capital dan Pertumbuhan	44
2.10 Mekanisme Transmisi Investasi Publik.....	45

2.11 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan.....	46
--	----

BAB III. METODELOGI PENELITIAN

3.1 3.1. Jenis dan Sumber Data	47
3.2 Metode Pengumpulan Data	47
3.3 Variabel Penelitian	47
3.4 Model Analisis	48
3.5 Metode Analisis.....	50

BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif Variabel Penelitian.....	56
4.2 Hasil Perhitungan	58
4.3 Hasil Pengujian Terhadap Penyimpangan Asumsi Klasik.....	60
4.4 Pengujian Hipotesis.....	64
4.5 Penafsiran Kefisien Determinasi.....	66
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	66

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin per Propinsi di Pulau Sumateratahun 2012	4
2. Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi Lampung Tahun 1994-2013.....	5
3. RealisasiPengeluaranPemerintahPropinsi Lampung PadaSektorPendidikandanKesehatan, Tahun 2000-2012.....	7
4. PenelitianTerdahulu.....	9
5. HasilUjiMultikolinieritas.....	63
6. HasilUji F-Statistik.....	64
7. HasilUji Parsial (Uji t-Statistik)	65
8. IndikatorKesehatan di Propinsi Lampung, tahun 2006-2010.....	73
9. Rata-rata Lama BalitaDisusuiMenurut Daerah TempatTinggal di Propinsi Lampung	74

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR	Halaman
1. Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap kemiskinan.....	13
2. Mekanisme Transmisi Investasi Publik untuk Mempengaruhi Distribusi Pendapatan	45
3. Hasil Uji Normalitas	61
4. Perkembangan Angka Melek Huruf Propinsi Lampung, Tahun 2008-2012 ..	68
5. Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin tahun 2012	69
6. Angka Harapan Hidup	72

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN	Halaman
1. Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin, Realisasi Penjumlahan	87
2. pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, Sektor Kesehatan	88
3. Propinsi dan Kabupaten Lampung tahun 1994-2013.....	88
4. Perkembangan Angka Melek Huruf di Propinsi Lampung Tahun 2008-2012	89
5. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah Menurut Jenis Kelamin tahun 2007-2012 di Propinsi Lampung.....	90
6. Perkembangan Angka Harapan Hidup tahun 2007-2012 diPropinsi Lampung	91
7. Data Realisasi Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Jumlah Penduduk tahun 1996.....	92
8. Hasil Uji Normalitas	93
9. Hasil Regresi POV dan PPSP(-6), PPSK.....	94
10. Hasil Uji Heterokedastisitas Metode General Least Square	95
11. Hasil Pengujian Multiolinieritas	96
12. Hasil Uji Autokorelasi.....	97
13. Hasil Regresi POV dan PPSP, PPSK.....	98
14. Hasil Regresi POV dan PPSP, PPSK t-1	99
15. Hasil Regresi POV dan PPSP, PPSK.t-2	100
16. Hasil Regresi POV dan PPSP, PPSK.t-3	101
17. Hasil Regresi POV dan PPSP, PPSK.t-4	102
18. Hasil Regresi POV dan PPSP, PPSK.t-5	103
19. Hasil Regresi POV dan PPSP, PPSK.t-7	104
20. Hasil Regresi POV dan PPSP, PPSK t-8	105
21. Hasil Regresi POV dan PPSP, PPSK.t-9	106
22. Grafik Regresi	107
23. Grafik R Square.....	108
24. Tabel t.....	109
25. Tabel F	110

BAB I.

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan menurut Mudrajad Kuncoro (2004) adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup yang rendah berkaitan pula dengan jumlah pendapatan yang sedikit, perumahan yang kurang layak, kesehatan dan pelayanan kesehatan yang buruk, tingkat pendidikan masyarakat yang rendah sehingga berakibat pada rendahnya sumber daya manusia dan banyaknya pengangguran. Tingkat standar hidup dalam suatu negara bisa diukur dari beberapa indikator antara lain *Gross National Product (GNP) perkapita*, pertumbuhan relatif nasional dan pendapatan per kapita, distribusi pendapatan nasional, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Menurut Todaro (2000), konsep yang mengacu kepada garis kemiskinan disebut kemiskinan *absolut*, sedangkan konsep yang pengukurannya tidak didasarkan pada garis kemiskinan disebut kemiskinan *relatif*. Kemiskinan *absolut* adalah derajat kemiskinan di bawah, dimana kebutuhan-kebutuhan minimum untuk bertahan hidup tidak dapat terpenuhi, kemiskinan *relatif* adalah suatu ukuran mengenai kesenjangan di dalam distribusi pendapatan, biasanya dapat didefinisikan di dalam kaitannya dengan tingkat rata-rata dari distribusi yang dimaksud.

Mengutip pendapat Nurske, Jhingan (2004) dan Mudrajad Kuncoro (2004) menyatakan bahwa negara/daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi, umumnya terjat ke dalam lingkaran yang biasa disebut lingkaran kemiskinan (*vicious circle*). Nurske menjelaskan bahwa lingkaran kemiskinan mengandung arti deretan melingkar kekuatan-kekuatan yang satu sama lain berinteraksi sedemikian rupa sehingga menempatkan suatu negara/daerah yang tingkat kemiskinannya tinggi tetap berada dalam keadaan terbelakang, sehingga kemiskinan adalah sebab sekaligus akibat.

Berdasarkan konsep kemiskinan yang tertuliskan pada awal latar belakang terdapat beberapa perbedaan dan persamaan secara teoritis mengenai konsep kemiskinan. Secara empiris, menurut Adi Widodo, et al (2011) bahwa alokasi pengeluaran pemerintah sektor publik tidak secara langsung mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia (IPM) ataupun kemiskinan, namun secara bersama-sama (simultan) dengan pengeluaran sektor publik dan indeks pembangunan manusia dapat mempengaruhi kemiskinan. Hal tersebut berarti bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan tidak bisa berdiri sendiri sebagai variabel independen dalam mempengaruhi kemiskinan, namun harus berinteraksi dengan variabel lain (variabel Indeks Pembangunan Manusia). Hal ini juga diperkuat dengan hasil studi Adi Widodo yang menunjukkan bahwa selain berperan sebagai variabel *pure moderator*, indeks pembangunan manusia juga berperan sebagai variabel *intervening*, dalam kaitannya dengan hubungan antara pengeluaran di sektor pendidikan dan kesehatan dengan pengentasan kemiskinan. Sehingga implikasi dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan

dan kesehatan akan dapat mempengaruhi kemiskinan jika pengeluaran tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan kualitas pembangunan manusia.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan oleh Raghendra Jha, et al (2001) yang bertujuan untuk mengetahui apakah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan sektor kesehatan mempengaruhi kemiskinan di negara India. Dengan menggunakan alat analisis OLS, Raghendra Jha melihat belanja pembangunan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mempengaruhi kemiskinan. Hasilnya diperoleh bahwa pengaruh variabel bebas yaitu belanja pembangunan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap variabel terikat kemiskinan. Hal ini mengimplikasikan bahwa di negara India, kebijakan pemerintah pada belanja pembangunan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan secara nyata mampu mengurangi tingkat kemiskinan.

Didukung penelitian Nabeela Asghar(2012) di Pakistan tahun 1972 – 2008, peran pemerintah mampu mengurangi kemiskinan melalui peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan. Adapun pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan dalam jangka panjang, pengeluaran pemerintah sektor kesehatan mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan dalam jangka panjang.

Salah satu indikator yang dapat dilihat dari keberhasilan pembangunan ekonomi tersebut adalah dengan melihat banyaknya jumlah penduduk miskin.

Pembangunan ekonomi di Propinsi Lampung masih dikatakan belum begitu

berhasil, hal ini terlihat dari masih tingginya jumlah penduduk miskin yang ada di Propinsi Lampung. Tabel 1 berikut memperlihatkan perkembangan jumlah penduduk dan persentase penduduk miskin di Pulau Sumatera, Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin per Propinsi di Pulau Sumatera Tahun 2012.

Propinsi	Jumlah penduduk miskin (000) ribu jiwa		Total	Total Persentase penduduk miskin (%)
	Perkotaan	Perdesaan		
Nanggroe Aceh Darussalam	165,40	711,10	876,50	18,58
Sumatera Utara	669,40	709,10	1.408,50	10,41
Sumatera Barat	124,30	273,60	833,40	8,00
R i a u	156,40	324,90	481,30	8,05
J a m b i	105,30	164,70	270,00	8,28
Sumatera Selatan	367,60	674,40	1.042,00	13,48
Bengkulu	92,70	217,80	310,50	17,51
Lampung	237,90	981,10	1.219,00	16,96
Kepulauan Bangka Belitung	24,60	46,20	70,80	6,96
Kepulauan Riau	106,60	24,60	131,20	7,08

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, BPS Nasional Tahun 2013

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa Propinsi Lampung mempunyai jumlah penduduk miskin nomor 2 terbanyak setelah propinsi Sumatera Utara yaitu sebanyak 1.219 ribu jiwa dan berdasarkan persentase penduduk miskin menempati posisi ketiga yaitu 16,96 persen setelah Nanggroe Aceh 18,85 persen, dan Bengkulu 17,51 persen. Bila kita pelajari lebih dalam lagi seharusnya Propinsi Lampung tidak banyak mempunyai jumlah penduduk miskin, mengingat letak geografis yang strategis yaitu berada sebagai pintu gerbang Pulau Sumatera. Seharusnya efisiensi

dan pemerataan pembangunan di Pulau Jawa yang menjadi pusat produksi dapat berimbas secara langsung pada Propinsi Lampung.

Perkembangan penduduk miskin di Propinsi Lampung dalam 20 tahun terakhir mengalami flutuasi, Terlihat pada tahun 2011, penurunan pertumbuhan angka penduduk miskin terbanyak sebesar 181 ribu jiwa atau turun sebesar 12,23 persen. Jumlah penduduk miskin terendah tahun 1994 yaitu sebesar 1,170 ribu jiwa akan tetapi setelah krisis moneter tahun 1998, tahun 2013 merupakan jumlah penduduk miskin terendah yaitu sebesar 1,202 ribu jiwa. Jumlah penduduk miskin tertinggi pada tahun 1999 sebesar 2,037 untuk lebih lengkapnya dapat dilihat di Tabel 2.

Tabel 2. Jumlah Penduduk Miskin di Propinsi Lampung Tahun 1994–2013.

Tahun	Penduduk Miskin (ribu jiwa)	Pertumbuhan(%)
1994	1,170	-
1995	1,800	53,84
1996	1,300	-0,27
1997	1,480	13,84
1998	1,560	5,40
1999	2,037	30,57
2000	1,739	-14,62
2001	1,702	-2,12
2002	1,693	-0,53
2003	1,662	-1,83
2004	1,625	-2,23
2005	1,659	2,09
2006	1,684	1,50
2007	1,661	-1,36
2008	1,597	-3,85
2009	1,558	-2,44
2010	1,479	-7,90
2011	1,298	-12,23
2012	1,219	-2,65
2013	1,202	-1,39

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan, BPS Propinsi Lampung tahun 2013

Dalam upaya untuk meningkatkan pembangunan ekonomi, pemerintah telah meningkatkan pembangunan sumber daya manusia. Hal ini terwujud nyata dalam bentuk alokasi pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan. Sesuai dengan teori pertumbuhan baru, yang sangat menekankan pentingnya peranan pemerintah terutama dalam meningkatkan pembangunan modal manusia (*human capital*) dan mendorong penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas, dimana pertumbuhan produktivitas tersebut pada gilirannya merupakan motor penggerak pertumbuhan (*engine of growth*).

Pada dasarnya pembangunan sumber daya manusia merupakan komposisi dari pengeluaran pembangunan sektor pendidikan, kebudayaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa; sektor kesehatan, kesejahteraan, peranaan wanita, anak, dan remaja; sektor tenaga kerja; dan sektor ilmu pengetahuan dan teknologi. (Nabeela Asghar, 2012)

Penelitian ini hanya dibatasi pada variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan. Hal ini dikarenakan, beberapa tahun terakhir ini pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan yang berhubungan dengan pengentasan kemiskinan melalui sekolah dan kesehatan gratis bagi penduduk miskin. Tentunya untuk merealisasikan kebijakan tersebut pemerintah telah mengalokasikan pendanaan dalam anggaran belanjanya yang mengharuskan dari total APBN maupun APBD sesuai dengan UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 tentang pendidikan dan UU No 36 tahun 2009 Pasal 171 tentang kesehatan agar mengalokasikan 20 persen untuk sektor pendidikan dan 10 persen untuk sektor kesehatan. Hal ini dirasa perlu karena mengingat sampai saat ini masih banyak

sekali penduduk di Indonesia yang hidup dibawah garis kemiskinan serta masih banyaknya jumlah masyarakat miskin, sehingga sulit untuk mendapatkan akses pendidikan dan kesehatan yang baik. Data tentang realisasi pengeluaran Pemerintah Daerah Propinsi Lampung pada sektor pendidikan dan kesehatan dapat dilihat pada Tabel 3.

Dari tabel 3, pada tahun 2011, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Rp.213,419 miliar dan Pengeluaran sektor kesehatan sebesar Rp.277,543 miliar. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya, namun pada tahun tersebut jumlah penduduk miskin cenderung berkurang.

Tabel 3. Realisasi Pengeluaran Pemerintah Propinsi Lampung Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan, Tahun 2000-2012.(Dalam Miliar Rupiah).

Tahun	Sektor Pendidikan	Sektor Kesehatan
1999	3,499	13,202
2000	9,398	15,199
2001	11,194	17,076
2002	26,155	32,899
2003	28,869	34,106
2004	51,566	68,866
2005	33,004	47,715
2006	67,622	71,246
2007	106,000	102,028
2008	119,334	131,979
2009	284,700	143,387
2010	250,634	271,218
2011	213,249	277,543
2012	298,806	330,626
2013	338,545	391,229

Sumber : www.djpk.depkeu.go.id

Berdasarkan penelitian Raghendra Jha, et al(2001), secara keseluruhan menyatakan adanya pengaruh yang negatif antara pengeluaran pemerintah Sektor pendidikan, sektor kesehatan dan tingkat kemiskinan atau sebaliknya. Sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan sebagai salah satu faktor naik turunnya jumlah penduduk miskin, khususnya di Propinsi Lampung .

1.2 Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang, maka masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung.
2. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung.
3. Bagaimana pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung.

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung.
2. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung.

1.4 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti (tahun)	Data	Variabel	Hasil	Studi Kasus
1.	Sanjeev Gupta at al(2001)	Time series (1984-1995)	Efisiensi pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan di negara-negara Afrika tahun 1984-1995	Penelitian menunjukkan bahwa rata-rata Negara di Afrika kurang efisien dibandingkan Negara-negara di Asia dan belahan bumi bagian barat, penelitian ini lebih lanjut menunjukkan bahwa perbaikan dalam pencapaian output pendidikan dan kesehatan membutuhkan alokasi anggaran lebih tinggi, untuk menekan jumlah penduduk miskin di Afrika.	37 Negara Afrika
2.	Raghendra Jha at al(2001)	Time series (1962-2007)	Pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dan kesehatan, mempengaruhi kemiskinan	Pengaruh variabel bebas yaitu belanja pembangunan, Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap variabel terikat (kemiskinan). Hal ini mengimplikasikan bahwa di India kebijakan pemerintah pada belanja pembangunan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan secara nyata mampu mengurangi tingkat kemiskinan.	India
3.	Minh Quang Dao at al(2008)	Time series(2006-2007)	IPM, kemiskinan	Dampak beberapa variabel yang mempengaruhi kemiskinan secara empiris. Menghasilkan rekomendasi kebijakan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejak ditemukannya rasio persamaan gender mempengaruhi kemiskinan dinegara berkembang, menjadi sebuah kepentingan bagi pemerintah pada negara tersebut untuk mengimplementasikan program yang membuka kesempatan pendidikan bagi wanita. 2. Pemerintah di negara berkembang harus memperhatikan ibu hamil dalam rangka mengurangi kemiskinan. Melalui penurunan angka kematian ibu hamil yang disebabkan saat kehamilan maupun saat kelahiran. 3. Harus ada usaha terus menerus untuk menekan angka gizi buruk 4. Pembangunan ekonomi yang berpihak pada pengurangan kemiskinan melalui peningkatan pendidikan. 5. Memperluas kesempatan pendidikan secara pokok dan memberikan pelajaran tentang kemiskinan di negara berkembang. 	35 negara berkembang

bersambung`

Sambungan

No	Peneliti (tahun)	Data	Variabel	Hasil	Studi Kasus
4.	Nabeela Asghar(2009)	Cross section(1972-2008)	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan terhadap kemiskinan di Pakistan(1972-2008)	Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan mempunyai hubungan negatif terhadap kemiskinan dalam jangka panjang.	Pakistan
5.	Wadad Saad at al(2009)	Time series (1962-2007)	Sektor pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan pertanian	Menunjukkan bahwa sektor pendidikan memiliki efek positif pada pertumbuhan pengeluaran pemerintah dalam jangka pendek dan mempunyai hubungan negatif dalam jangka pendek. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan berkorelasi negatif dalam jangka panjang dan mempunyai hubungan tidak signifikan dalam jangka pendek. Pengeluaran pemerintah sektor pertanian mempunyai hubungan signifikan dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Dengan demikian, alokasi sumber daya pemerintah terhadap sektor pertanian menjadi prioritas untuk meningkatkan pertumbuhan.	Lebanon
6.	Penelitian Roland at al(2010)	Time series(1980-2009)	Pengeluaran pemerintah sektor publik investasi pembangunan manusia	Peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan sektor kesehatan secara nyata mampu meningkatkan investasi pembangunan manusia yang mempunyai dampak dalam menekan angka kemiskinan di negara Karibia	Karibia

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah sebagai tambahan informasi dalam pembuatan perencanaan dan kebijakan perumusan pengeluaran pemerintah, serta diharapkan sebagai bahan kajian peneliti-peneliti lain untuk menulis topik yang sama.

1.6 Kerangka Pemikiran

Faktor-faktor penyebabnya kemiskinan :

a. Faktor-Faktor penyebab kemiskinan secara manusia:

1. Sikap dan pola pikir serta wawasan yang rendah Malas berpikir dan bekerja;

2. Kurang keterampilan;
3. Pola hidup konsumtif;
4. Sikap apatis/egois/pesimis;
5. Rendah diri;
6. Adanya gep antara kaya dan miskin;
7. Belenggu adat dan kebiasaan;
8. Adanya teknologi baru yang hanya menguntungkan kaum tertentu (kaya);
9. Adanya perusakan lingkungan hidup;
10. Pendidikan rendah;
11. Populasi penduduk yang tinggi,
12. Pemborosan dan kurang menghargai waktu;
13. Kurang motivasi mengembangkan prestasi;
14. Kurang kerjasama;
15. Pengangguran dan sempitnya lapangan kerja;
16. Kesadaran politik dan hokum;
17. Tidak dapat memanfaatkan SDA dan SDM setempat;(18)Kurangnya tenaga terampil; bertumpun ke kota, dan kurangnya kesehatan yang diakibatkan asupan gizi yang buruk. (Manurung, 1993)

b. Faktor-Faktor penyebab kemiskinan secara non manusia:

Adapun Faktor-Faktor penyebab kemiskinan secara non manusia:

1. Faktor alam, lahan tidak subur/lahan sempit;
2. Keterampilan atau keterisolasi desa;
3. Sarana pehubungan tidak ada;
4. Kurang Fasilitas umum;

5. Langkanya modal;
6. Tidak stabilnya harga hasil bumi;
7. Industrialisasi sangat minim;
8. belum terjagkau media informasi;
9. Kurang berfungsinya lembaga-lembaga desa;
10. Kepemilikan tanah kurang pemerataan. (Manurung, 1993)

Dalam teorinya, Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, sebab pada tahap ini pemerintah harus menyediakan prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar (Mangkoesoebroto, 1994).

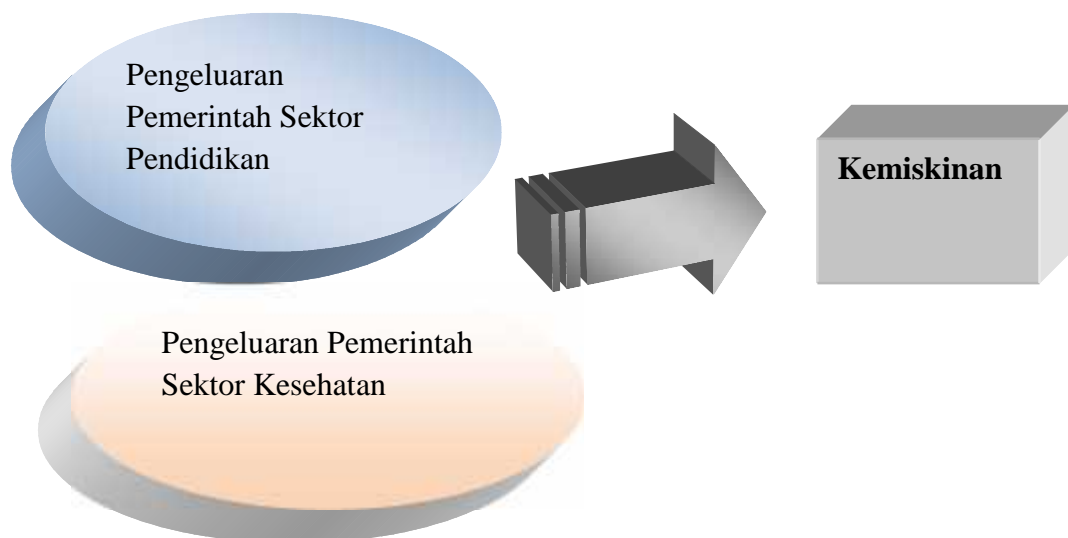
Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan bahwa pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial, seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya. Dari teori Rostow dan Musgrave tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sangat diperlukan dalam rangka pembangunan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Mangkoesoebroto, 1994).

Melalui sisi pengeluaran pemerintah, penurunan kemiskinan dan redistribusi pendapatan dapat dilakukan dengan tiga instrumen alokasi anggaran pemerintah,

yaitu (1) subsidi langsung atau subsidi individu yang ditargetkan pada rumah tangga berpendapatan rendah, (2) subsidi harga, subsidi komoditi yang digunakan oleh rumah tangga terutama untuk kebutuhan pokok, dan (3) pengeluaran langsung pemerintah terhadap pelayanan publik dan infrastruktur terutama pada sektor kesejahteraan, kesehatan, dan pendidikan yang diutamakan untuk rumah tangga berpendapatan rendah (Rasidin K. Sitepu at al, 2005).

Pada konsepnya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan akan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Peningkatan tersebut ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber daya manusia yang berkualitas akan mendorong pembangunan ekonomi kearah yang lebih maju, sehingga pada akhirnya dampak dari pembangunan ekonomi yang maju tersebut akan dapat menurunkan jumlah kemiskinan. Berdasarkan uraian tersebut maka dapat digambarkan kerangka pikir sebagai berikut:

Gambar 1. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan terhadap kemiskinan.



Sumber: Imam Ghozali, 2007

1.7 Hipotesis Penelitian

Hipotesis dalam penelitian ini di duga:

1. Pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung.
2. Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan berpengaruh negatif terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung.
3. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Kemiskinan seringkali dipahami sebagai gejala rendahnya tingkat kesejahteraan semata padahal kemiskinan merupakan gejala yang bersifat kompleks dan multidimensi. Rendahnya tingkat kehidupan yang sering dijadikan alat ukur kemiskinan pada hakekatnya hanya merupakan salah satu mata rantai dari munculnya lingkaran kemiskinan. Kemiskinan merupakan masalah manusia yang telah lama diperbincangkan karena berkaitan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat dan upaya penanganannya.

Dalam panduan keluarga sejahtera (1996) kemiskinan adalah suatu keadaan dimana seorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental maupun fisiknya dalam memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan merupakan rendahnya tingkat penghasilan yang didapatkan oleh seseorang sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya secara baik.

World Bank (2003), dalam definisi kemiskinan adalah: *"the denial of choice and opportunities most basic for human development to lead a long healthy, creative life and enjoy a decent standard of living freedom, self esteem and the respect of other"*. (www.worldbank.org)

Ada beberapa ukuran kemiskinan yang telah diterapkan di Indonesia dewasa ini, diantaranya adalah ukuran dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dan *United Nations Development Program* (UNDP).

2.1 Definisi Kemiskinan

Kemiskinan adalah permasalahan yang sifatnya *multidimensional*. Pendekatan dengan satu bidang ilmu tertentu tidaklah mencukupi untuk mengurai makna dan fenomena yang menyertainya. Definisi secara umum yang lazim dipakai dalam perhitungan dan kajian-kajian akademik adalah pengertian kemiskinan yang diperkenalkan oleh Bank Dunia yaitu sebagai ketidakmampuan mencapai standar hidup minimum (World Bank, 2003). Friedman mendefinisikan kemiskinan (Usman, 2004) sebagai ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuatan sosial. Basis kekuatan sosial tidak terbatas hanya pada (1) modal produktif atau aset (misalnya organisasi sosial politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama, partai politik, dan lain-lain), tetapi juga pada (2) *network* atau jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang dan lain-lain; (3) pengetahuan dan keterampilan yang memadai; dan (4) informasi yang berguna untuk memajukan kehidupan mereka.

Scott menerangkan (Usman, 2006) bahwa kemiskinan setidaknya memiliki kondisi-kondisi yang pada umumnya didekati (1) dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntungan non material yang diterima oleh seseorang sehingga secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk atau kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat; (2) kadang-kadang didefinisikan dari segi

kepemilikan asset yakni tanah, rumah, peralatan, uang, emas, kredit dan lain-lain; (3) kemiskinan non-materi meliputi berbagai macam kebebasan, hak untuk memperoleh pekerjaan yang layak, hak atas rumah tangga dan kehidupan yang layak. United Nations Development Program (UNDP) mendefinisikan kemiskinan sebagai ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan dalam hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian “tidak adanya partisipasi dalam pengambilan keputusan publik” sebagai salah satu indikator kemiskinan (Cahyat 2004). Cahyat juga menyatakan bahwa di penghujung abad 20 muncul pengertian terbaru mengenai kemiskinan yaitu bahwa kemiskinan juga mencakup dimensi kerentanan, ketidakberdayaan, dan ketidakmampuan untuk menyampaikan aspirasi (*voicelessness*). Jadi kemiskinan berwajah majemuk atau bersifat multi dimensi.

1. Kemiskinan Relatif

Ravallion (1998) Kemiskinan relatif merupakan kondisi miskin karena pengaruh kebijakan pembangunan yang belum mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat sehingga menyebabkan ketimpangan distribusi pendapatan. Standar minimum disusun berdasarkan kondisi hidup suatu negara pada waktu tertentu dan perhatian terfokus pada golongan penduduk “termiskin”, misalnya 20 persen atau 40 persen lapisan terendah dari total penduduk yang telah diurutkan menurut pendapatan/pengeluaran. Kelompok ini merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk, sehingga dengan menggunakan definisi ini berarti “orang miskin selalu hadir bersama kita”. Dalam praktek, negara kaya mempunyai garis kemiskinan relatif yang lebih tinggi dari pada negara miskin

seperti pernah dilaporkan oleh Ravallion (1998). Paper tersebut menjelaskan mengapa, misalnya, angka kemiskinan resmi (*official figure*) pada awal tahun 1990-an mendekati 15 persen di Amerika Serikat dan juga mendekati 15 persen di Indonesia (negara yang jauh lebih miskin). Artinya, banyak dari mereka yang dikategorikan miskin di Amerika Serikat akan dikatakan sejahtera menurut standar Indonesia (Ravallion, 1998).

(Ravallion, 1998)Tatkala negara menjadi lebih kaya (sejahtera), negara tersebut cenderung merevisi garis kemiskinannya menjadi lebih tinggi, terkecuali Amerika Serikat, dimana garis kemiskinan pada dasarnya tidak berubah selama hampir empat dekade. Misalnya, Uni Eropa umumnya mendefinisikan penduduk miskin adalah mereka yang mempunyai pendapatan per kapita di bawah 50 persen dari median (rata-rata) pendapatan. Ketika rata-rata pendapatan meningkat, garis kemiskinan relatif juga meningkat. Dalam hal mengidentifikasi dan menentukan sasaran penduduk miskin, maka garis kemiskinan relatif cukup untuk digunakan, dan perlu disesuaikan terhadap tingkat pembangunan negara secara keseluruhan. Garis kemiskinan relatif tidak dapat dipakai untuk membandingkan tingkat kemiskinan antar negara dan waktu karena tidak mencerminkan tingkat kesejahteraan yang sama.

Secara sederhana kemiskinan relatif dapat dilihat dengan membandingkan proporsi atau persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan Absolut dengan jumlah penduduk keseluruhan. Untuk lebih memperoleh gambaran yang sesungguhnya tentang tingkat kemiskinan relatif atau pemerataan kesejahteraan ekonomi perlu diketahui distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan sering diukur dengan membagi penduduk menjadi 5 atau 10 kelompok

(*quintiles* atau *deciles*) sesuai dengan tingkat pendapatannya. Kemudian menetapkan proporsi yang diterima oleh masing-masing kelompok pendapatan. Selanjutnya ukuran distribusi pendapatan dapat diukur dengan “Rasio Konsentrasi Gini” (*Gini Concentration Ratio*) atau lebih sederhana disebut dengan Koefisien Gini. Koefisien Gini adalah ukuran ketidakseimbangan/ ketimpangan (pendapatan, kesejahteraan) agregat (keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga satu (ketimpangan sempurna). Dalam prakteknya, Koefisien Gini pada negara-negara yang dikenal begitu tajam ketimpangan kesejahteraan di kalangan penduduknya berkisar antara 0,50 hingga 0,70. Sedangkan untuk negara-negara yang distribusi pendapatannya dikenal paling merata, Koefisien Gini berkisar antara 0,20 sampai 0,35 (Todaro, 2000).

2. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan secara absolut ditentukan berdasarkan ketidakmampuan untuk mencukupi kebutuhan pokok minimum seperti pangan, sandang, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk bisa hidup dan bekerja. BPS(2008), mendefinisikan kemiskinan absolut merupakan standar kehidupan minimum yang dibutuhkan untuk kebutuhan dasar yang diperlukan, baik makanan maupun non makanan. Standar kehidupan minimum yang dibutuhkan minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar ini disebut sebagai garis kemiskinan. BPS(2009), mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita(garis kemiskinan makanan) ditambah minimum non makanan yang merupakan dasar seseorang yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga

dasar lainnya(garis kemiskinan non makanan) standar pokok minimum diterjemahkan sebagai ukuran finansial dalam bentuk uang. Nilai kebutuhan minimum kebutuhan dasar tersebut dikenal dengan istilah garis kemiskinan. Penduduk yang pendapatannya di bawah garis kemiskinan digolongkan sebagai penduduk miskin.(UNDP, 1990)

Garis kemiskinan absolut “tetap (tidak berubah)” dalam hal standar hidup, garis kemiskinan absolut mampu membandingkan kemiskinan secara umum. Garis kemiskinan Amerika Serikat tidak berubah dari tahun ke tahun, sehingga angka kemiskinan sekarang mungkin berbanding dengan angka kemiskinan satu dekade yang lalu, dengan catatan bahwa definisi kemiskinan tidak berubah. Garis kemiskinan absolut sangat penting jika seseorang akan mencoba menilai efek dari kebijakan anti kemiskinan antar waktu, atau memperkirakan dampak dari suatu proyek terhadap kemiskinan (misalnya, pemberian kredit skala kecil). Angka kemiskinan akan berbanding antara satu negara dengan negara lain hanya jika garis kemiskinan absolut yang sama digunakan di kedua negara tersebut.(UNDP, 1990)

World Bank(2003), memerlukan garis kemiskinan absolut agar dapat membandingkan angka kemiskinan antar negara. Hal ini bermanfaat dalam menentukan kemana menyalurkan sumber daya finansial (dana) yang ada, juga dalam menganalisis kemajuan dalam memerangi kemiskinan. Pada umumnya ada dua ukuran yang digunakan oleh World Bank, yaitu : a) US \$ 1 per kapita per hari dimana diperkirakan ada sekitar 1,2 miliar penduduk dunia yang hidup dibawah ukuran tersebut; b) US \$ 2 perkapita per hari dimana lebih dari 2 miliar penduduk yang hidup kurang dari batas tersebut. US dollar yang digunakan adalah US \$ PPP

(Purchasing Power Parity), bukan nilai tukar resmi (exchange rate). Kedua batas ini adalah garis kemiskinan absolut.

3. Terminologi Kemiskinan Lainnya

Terminologi lain yang juga pernah dikemukakan sebagai wacana adalah kemiskinan struktural dan kemiskinan kultural. Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan Struktural : Masalah dan Kebijakan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995) mendefinisikan “Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang ditengarai atau didalihkan bersebab dari kondisi struktur, atau tatanan kehidupan yang tak menguntungkan”. Dikatakan tak menguntungkan karena tatanan itu tak hanya menerbitkan akan tetapi juga melanggengkan kemiskinan di dalam masyarakat. Di dalam kondisi struktur yang demikian itu kemiskinan menggejala bukan oleh sebab-sebab yang alami atau oleh sebab-sebab yang pribadi, melainkan oleh sebab tatanan sosial yang tak adil. Tatanan yang tak adil ini menyebabkan banyak warga masyarakat gagal memperoleh peluang atau akses untuk mengembangkan dirinya serta meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga mereka yang malang dan terperangkap ke dalam perlakuan yang tidak adil ini menjadi serba berkekurangan, tak setara dengan tuntutan untuk hidup yang layak dan bermartabat sebagai manusia. Salah satu contoh adalah kemiskinan karena lokasi tempat tinggal yang terisolasi, misalnya, orang Mentawai di Kepulauan Mentawai, orang Melayu di Pulau Christmas, suku Tengger di pegunungan Tengger Jawa Timur, dan sebagainya. (Suyanto,1995)

Sedangkan kemiskinan kultural diakibatkan oleh faktor-faktor adat dan budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang tetap melekat dengan indikator kemiskinan. Padahal indikator kemiskinan tersebut seyogyanya bisa

dikurangi atau bahkan secara bertahap bisa dihilangkan dengan mengabaikan faktor-faktor adat dan budaya tertentu yang menghalangi seseorang melakukan perubahan-perubahan ke arah tingkat kehidupan yang lebih baik. Kemiskinan karena tradisi sosio-kultural terjadi pada suku-suku terasing, seperti halnya suku Badui di Cibeo Banten Selatan, suku Dayak di pedalaman Kalimantan, dan suku Kubu di Jambi.

Soetandyo Wignjosoebroto dalam “Kemiskinan, Kebudayaan, dan Gerakan Membudayakan Keberdayaan” yang dirangkum oleh Suyanto (1995) mendefinisikan “Kemiskinan adalah suatu ketidak-berdayaan”. Keberdayaan itu sesungguhnya merupakan fungsi kebudayaan. Artinya, berdaya tidaknya seseorang dalam kehidupan bermasyarakat dalam kenyataannya akan banyak ditentukan dan dipengaruhi oleh determinan-determinan sosial-budayanya (seperti posisi, status, dan wawasan yang dipunyainya). Sebaliknya, semua fasilitas sosial yang sudah diraih dan dapat didayagunakan olehnya, akan ikut pula menentukan keberdayaannya kelak di dalam pengembangan dirinya di tengah masyarakat. Seringkali timbul suatu rasa pesimis di kalangan orang miskin dengan merasionalisasi keadaannya bahwa hal itu “sudah takdir”, dan bahwa setiap orang itu sesungguhnya sudah mempunyai suratan nasibnya sendiri-sendiri, yang mestinya malah harus disyukuri. Oleh karena itu, Soetandyo menyarankan ditingkatkannya “Gerakan Membudayakan Keberdayaan” pada lapisan masyarakat bawah. Melek huruf, melek bahasa, melek fasilitas, melek ilmu, melek informasi, melek hak, dan melek-melek lainnya adalah suatu keberdayaan yang harus terus dimungkinkan kepada lapisan-lapisan masyarakat bawah agar tidak terjebak ke dalam kemiskinan kultural.

2.2 Pendekatan Dalam Studi Kemiskinan

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan dalam studi tentang kemiskinan, yaitu pendekatan obyektif dan pendekatan subyektif. Pendekatan obyektif yaitu pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang telah ditentukan oleh pihak lain terutama para ahli yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial sesuai dengan standar kehidupan, sedangkan pendekatan subyektif adalah pendekatan dengan menggunakan ukuran kemiskinan yang ditentukan oleh orang miskin itu sendiri yang diukur dari tingkat kesejahteraan sosial dari orang miskin dibandingkan dengan orang kaya yang ada dilingkungannya. Seperti diungkapkan oleh Joseph F. Stepanek, ed. (1985) bahwa pendekatan subyektif menilai kemiskinan berdasarkan pendapat atau pandangan orang miskin sendiri.

Pendekatan obyektif atau sering juga disebut sebagai pendekatan kesejahteraan (*the welfare approach*) menekankan pada penilaian normatif dan syarat yang harus dipenuhi agar keluar dari kemiskinan. Dengan menggunakan pendekatan obyektif banyak ditemukan berbagai dimensi pendekatan yang digunakan oleh para ahli maupun lembaga. Seperti BAPPENAS(2008), menggunakan beberapa pendekatan utama antara lain; pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*), pendekatan pendapatan (*income approach*), pendekatan kemampuan dasar (*human capability approach*) dan pendekatan *objective and subjective*.

Pendekatan kebutuhan dasar, melihat bahwa kemiskinan sebagai suatu ketidakmampuan (*lack of capabilities*) seseorang, keluarga dan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan minimum, antara lain pangan, sandang, papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, penyediaan air bersih dan sanitasi. Sedangkan pendekatan pendapatan melihat bahwa kemiskinan disebabkan oleh rendahnya penguasaan

asset, dan alat-alat produktif seperti tanah dan lahan pertanian atau perkebunan, sehingga secara langsung mempengaruhi pendapatan seseorang dalam masyarakat. Pendekatan ini, menentukan secara digit standar pendapatan seseorang di dalam masyarakat untuk membedakan kelas sosialnya.

Demikian pula pendekatan kemampuan dasar yang menilai bahwa kemiskinan sebagai keterbatasan kemampuan dasar seperti kemampuan membaca dan menulis untuk menjalankan fungsi minimal dalam masyarakat. Berbeda dengan pendekatan lainnya pendekatan hak melihat bahwa kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial-politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki. (Minh Quang Dao, 2008)

2.3 Faktor-faktor Penyebab Kemiskinan

Menurut BPS (2012) kemiskinan secara asal penyebabnya terbagi menjadi 2 macam. Pertama adalah kemiskinan kultural yaitu kemiskinan yang disebabkan oleh adanya faktor-faktor adat atau budaya suatu daerah tertentu yang membelenggu seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu sehingga membuatnya tetap melekat dengan kemiskinan. Kemiskinan seperti ini bisa dihilangkan atau sedikitnya bisa dikurangi dengan mengabaikan faktor-faktor yang menghalanginya untuk melakukan perubahan kearah tingkat kehidupan yang

lebih baik. Kedua adalah kemiskinan struktural, yaitu kemiskinan yang terjadi sebagai akibat ketidakberdayaan seseorang atau sekelompok masyarakat tertentu terhadap sistem atau tatanan sosial yang tidak adil, karenanya mereka berada pada posisi tawar yang sangat lemah dan tidak memiliki akses untuk mengembangkan serta membebaskan diri mereka sendiri dari perangkap kemiskinan atau dengan perkataan lain “seseorang atau sekelompok masyarakat menjadi miskin karena mereka miskin”. Kemiskinan secara konseptual dibedakan menurut kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut, dimana perbedaannya terletak pada standar penilaiannya.

Menurut Dumairy (1997) pada umumnya di negara Indonesia penyebab kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Laju Pertumbuhan Penduduk.

Pertumbuhan penduduk Indonesia terus meningkat di setiap 10 tahun menurut hasil sensus penduduk. Menurut Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan pada tahun 1990 Indonesia memiliki 179 juta lebih penduduk. Kemudian di sensus penduduk tahun 2000 penduduk meningkat sebesar 27 juta atau menjadi 206 juta jiwa. Dapat diringkaskan pertambahan penduduk Indonesia per satuan waktu adalah sebesar setiap tahun bertambah 2,04 juta orang pertahun atau 170 ribu orang per bulan atau 5.577 orang perhari atau 232 orang per jam atau 4 orang per menit. Banyaknya jumlah penduduk ini membawa Indonesia menjadi negara ke-4 terbanyak penduduknya setelah China, India dan Amerika. Meningkatnya jumlah penduduk membuat Indonesia semakin terpuruk dengan keadaan ekonomi yang belum mapan. Jumlah penduduk yang bekerja tidak sebanding dengan jumlah beban ketergantungan. Penghasilan yang minim

ditambah dengan banyaknya beban ketergantungan yang harus ditanggung membuat penduduk hidup di bawah garis kemiskinan.

2. Angkatan Kerja, Penduduk yang Bekerja dan Pengangguran.

Secara garis besar penduduk suatu negara dibagi menjadi dua yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Yang tergolong sebagai tenaga kerja ialah penduduk yang berumur di dalam batas usia kerja. Batasan usia kerja berbeda-beda di setiap negara yang satu dengan yang lain. Batas usia kerja yang dianut oleh Indonesia ialah minimum 10 tahun tanpa batas umur maksimum. Jadi setiap orang atau semua penduduk berumur 10 tahun tergolong sebagai tenaga kerja. Sisanya merupakan bukan tenaga kerja yang selanjutnya dapat dimasukkan dalam kategori beban ketergantungan.

Tenaga kerja (manpower) dipilah pula kedalam dua kelompok yaitu angkatan kerja (labor force) dan bukan angkatan kerja. Yang termasuk angkatan kerja ialah tenaga kerja atau penduduk dalam usia kerja yang bekerja atau mempunyai pekerjaan namun untuk sementara tidak bekerja, dan yang mencari pekerjaan. Sedangkan yang termasuk sebagai bukan angkatan kerja adalah tenaga kerja dalam usia kerja yang tidak sedang bekerja, tidak mempunyai pekerjaan dan tidak sedang mencari pekerjaan, yakni orang-orang yang kegiatannya bersekolah, mengurus rumah tangga, serta orang yang menerima pendapatan tapi bukan merupakan imbalan langsung atas jasa kerjanya. Selanjutnya angkatan kerja dibedakan pula menjadi dua subkelompok yaitu pekerja dan penganggur.

Yang dimaksud dengan pekerja adalah orang-orang yang mempunyai pekerjaan, mencakup orang-orang yang mempunyai pekerjaan dan memang sedang bekerja maupun orang yang memiliki pekerjaan namun sedang tidak bekerja. Adapun

yang dimaksud dengan pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, lengkapnya orang yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan. Pengangguran semacam ini oleh BPS dikategorikan sebagai pengangguran terbuka. (Dumairy, 1997) .

3. Distribusi Pendapatan dan Pemerataan Pembangunan.

Distribusi pendapatan nasional mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Kriteria ketidakmerataan versi Bank Dunia didasarkan atas porsi pendapatan nasional yang dinikmati oleh tiga lapisan penduduk, yakni 40 persen penduduk berpendapatan rendah (penduduk miskin); 40 persen penduduk berpendapatan menengah; serta 20 persen penduduk berpendapatan tertinggi (penduduk terkaya). Ketimpangan dan ketidakmerataan distribusi dinyatakan parah apabila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati kurang dari 12 persen pendapatan nasional. Ketidakmerataan dianggap sedang atau moderat bila 40 persen penduduk berpendapatan rendah menikmati 12 hingga 17 persen pendapatan nasional. Sedangkan jika 40 persen penduduk miskin menikmati lebih dari 17 persen pendapatan nasional maka ketimpangan atau kesenjangan dikatakan lunak, distribusi pendapatan nasional dikatakan cukup merata (Dumairy, 1997)

Pendapatan penduduk yang didapatkan dari hasil pekerjaan yang mereka lakukan relatif tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari sedangkan ada sebagian penduduk di Indonesia mempunyai pendapatan yang berlebih. Ini disebut juga sebagai ketimpangan. Ketimpangan pendapatan yang ekstrim dapat menyebabkan inefisiensi ekonomi. Penyebabnya sebagian adalah pada tingkat pendapatan rata-rata berapa pun, ketimpangan yang semakin tinggi akan menyebabkan semakin

kecilnya bagian populasi yang memenuhi syarat untuk mendapatkan pinjaman atau sumber kredit.

Selain itu ketimpangan dapat menyebabkan alokasi aset yang tidak efisien.

Ketimpangan yang tinggi menyebabkan penekanan yang terlalu tinggi pada pendidikan tinggi dengan mengorbankan kualitas universal pendidikan dasar, dan kemudian menyebabkan kesenjangan pendapatan yang semakin melebar (Todaro, 2000). Ketimpangan pembangunan di Indonesia selama ini berlangsung dan berwujud dalam berbagai bentuk dan aspek atau dimensi. Bukan saja berupa ketimpangan hasil-hasilnya, misalnya dalam hal pendapatan per kapita tetapi juga ketimpangan kegiatan atau proses pembangunan itu sendiri. Bukan pula semata-mata berupa ketimpangan spasial atau antar daerah tetapi ketimpangan sektoral dan ketimpangan regional.

Ketimpangan sektoral dan regional dapat ditengarai antara lain dengan menelaah perbedaan mencolok dalam aspek-aspek seperti penyerapan tenaga kerja, alokasi dana perbankan, investasi dan pertumbuhan. Sepanjang era PJP I (lima pelita) yang lalu, sektor pertanian rata-rata hanya tumbuh 3,54 persen per tahun.

Sedangkan sektor industri pengolahan tumbuh dengan rata-rata 12,22 persen per tahun. Di Repelita VI sektor pertanian saat itu ditargetkan tumbuh rata-rata 3,4 persen per tahun, sementara pertumbuhan rata-rata tahunan sektor industri pengolahan ditargetkan 9,4 persen per tahun. Tidak seperti masa era PJP I, dimana dalam pelita-pelita tertentu terdapat sektor lain yang tingkat pertumbuhannya lebih tinggi dari tingkat pertumbuhan sektor industri pengolahan, selama Repelita VI tingkat pertumbuhan sektor ini dicanangkan yang tertinggi dibandingkan sektor-sektor lainnya.

Sektor industri pengolahan diharapkan dapat menjadi sektor andalan sepanjang Repelita VI. Ketimpangan pertumbuhan antar sektor, khususnya antara sektor pertanian dan sektor industri pengolahan harus disikapi secara arif. Ketimpangan pertumbuhan sektoral ini bukanlah kecelakaan atau akses pembangunan.

Ketimpangan ini lebih kepada suatu hal yang terencana dan memang disengaja terkait dengan tujuan menjadikan Indonesia sebagai negara industri. Akan tetapi sampai sejauh manakah ketimpangan ini dapat ditolerir? Pemerintah perlu memikirkan kembali perihal ketepatan keputusan menggunakan industrialisasi sebagai jalur pembangunan karena akan sangat berdampak bagi pendapatan penduduk dan selanjutnya kemiskinan (Dumairy, 1997).

Tingkat pendidikan serta rendahnya kualitas penduduk juga merupakan salah satu penyebab kemiskinan di suatu negara. Ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan dan tingkat pengetahuan tenaga kerja. Untuk adanya perkembangan ekonomi terutama industri, jelas sekali dibutuhkan lebih banyak tenaga kerja yang mempunyai *skill* atau paling tidak dapat membaca dan menulis. Menurut Schumaker pendidikan merupakan sumber daya yang terbesar manfaatnya dibandingkan faktor-faktor produksi lain (Irawan, 2006). Kurangnya perhatian dari pemerintah. Pemerintah yang kurang peka terhadap laju pertumbuhan masyarakat miskin dapat menjadi salah satu faktor kemiskinan. Pemerintah tidak dapat memutuskan kebijakan yang mampu mengendalikan tingkat kemiskinan di negaranya.

2.4 Teori Pengeluaran Pemerintah

2.4.1 Pengertian Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah adalah semua pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah (Boediono, 1993). Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut.

Soetrisno (1984) mendefinisikan pengeluaran pemerintah sebagai penggunaan uang untuk melaksanakan fungsi pemerintah yang meliputi sumber daya ekonomi termasuk penggunaan sumber daya manusia, sumber daya alam, peralatan modal serta barang-barang dan jasa lainnya. Dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 ditegaskan bahwa Belanja daerah merupakan semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi *equitas* dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah.

Menurut William A. McEachern (2000) kebijakan fiskal menggunakan belanja pemerintah, pembayaran transfer, pajak dan pinjaman untuk mempengaruhi variabel makroekonomi seperti tenaga kerja, tingkat harga dan tingkat GDP. Alat kebijakan fiskal dapat dipisahkan menjadi dua kategori yaitu kebijakan fiskal stabilisator dan diskrit. Kebijakan fiskal penstabil otomatis atau disebut juga stabilisator terpasang menurut Lipsey (1992) adalah berbagai kebijakan yang dapat menurunkan kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional, sehingga mengurangi angka *multiplier*. Penstabil otomatis mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan nasional yang disebabkan oleh perubahan-perubahan *outonomous* pada pengeluaran-pengeluaran seperti investasi. Selain itu,

perangkat ini akan bekerja tanpa pemerintah harus bereaksi dengan sengaja, terhadap setiap perubahan pendapatan nasional pada waktu perubahan ini terjadi.

Tiga bentuk penstabil otomatis yang utama adalah sebagai berikut :

1. Pajak

Pajak langsung akan mengurangi besarnya fluktuasi pendapatan *disposebel* yang terkait dengan setiap fluktuasi pendapatan nasional tertentu. Dengan demikian, pada kecenderungan pengkonsumsi *marginal* tertentu dari pendapatan *disposebel*, pajak langsung mengurangi tingkat kecenderungan membelanjakan marjinal dari pendapatan nasional.

2. Pengeluaran Pemerintah

Pembelian barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah cenderung relatif stabil dalam menghadapi variasi pendapatan nasional yang bersifat siklis.

Banyak pengeluaran sudah disetujui oleh peraturan sebelumnya, sehingga hanya sebagian kecil saja yang dapat dirubah oleh pemerintah. Perubahan kecil tersebut dilakukan dengan sangat lambat. Sebaliknya, konsumsi dan pengeluaran swasta untuk investasi cenderung bervariasi sejalan dengan pendapatan nasional. Semakin besar peran pengeluaran pemerintah dalam suatu perekonomian, makin kecil kadar ketidakstabilan siklis pada seluruh pengeluaran. Meningkatnya peran pemerintah dalam perekonomian dapat saja merugikan atau menguntungkan. Meskipun demikian, pengeluaran pemerintah merupakan penstabil otomatis yang ampuh dalam perekonomian.

3. Transfer Pemerintah

Transfer pemerintah contohnya berupa jaminan sosial, jaminan kesejahteraan dan kebijakan bantuan pertanian. Pembayaran transfer yang berperan sebagai

stabilisator terpasang cenderung menstabilkan pengeluaran untuk konsumsi, dalam upaya menghadapi fluktuasi pendapatan nasional.

Kebijakan fiskal yang kedua adalah kebijakan fiskal diskresioner, yaitu memberlakukan perubahan pajak dan pengeluaran yang dirancang untuk mengimbangi kesenjangan yang timbul. Agar dapat melakukannya secara efektif, pemerintah secara periodik harus mengambil keputusan untuk merubah kebijakan fiskal. Dalam proses mempertimbangkan kebijakan fiskal diskresioner, perlu dipertimbangkan dua hal, yaitu kemudahan kebijakan fiskal untuk dirubah dan pandangan rumah tangga dan perusahaan atas kebijakan fiskal pemerintah yang bersifat sementara atau jangka panjang (Soediyono,1992)

Stabilitas perekonomian dapat dicapai apabila pemerintah mampu melaksanakan kebijakan fiskalnya dengan baik. Artinya pemerintah hanya mampu memelihara angkatan kerja tinggi (pengangguran rendah), tingkat harga yang stabil, tingkat suku bunga yang wajar, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Jika perekonomian stabil maka pendapatan masyarakat akan meningkat dan pengangguran menurun sehingga tercipta kesejahteraan sesuai dengan harapan masyarakat (Soediyono,1992).

Pengeluaran pemerintah mencerminkan kebijakan pemerintah. Apabila pemerintah telah menetapkan suatu kebijakan untuk membeli barang dan jasa, pengeluaran pemerintah mencerminkan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakan tersebut (Mangkoesoebroto, 1994).

Pengeluaran pemerintah mempunyai dasar teori yang dapat dilihat dari identitas keseimbangan pendapatan nasional yaitu $Y = C + I + G + (X-M)$ yang merupakan sumber legitimasi pandangan kaum Keynesian akan relevansi campur tangan

pemerintah dalam perekonomian. Dari persamaan tersebut dapat ditelaah bahwa kenaikan atau penurunan pengeluaran pemerintah akan menaikkan atau menurunkan pendapatan nasional.

Banyak pertimbangan yang mendasari pengambilan keputusan pemerintah dalam mengatur pengeluarannya. Pemerintah tidak cukup hanya meraih tujuan akhir dari setiap kebijaksanaan pengeluarannya, tetapi juga harus memperhitungkan sasaran antara yang akan menikmati kebijaksanaan tersebut. Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah tidak memadai, melainkan harus diperhitungkan siapa yang akan terpekerjakan atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian tidak melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1997). Teori mengenai pengeluaran pemerintah juga dapat dikelompokkan menjadi 2 bagian yaitu teori makro dan teori mikro (Mangkoesoebroto, 1994).

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah adalah penggunaan uang untuk semua pembelian barang atau jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah-pemerintah daerah dalam satu periode. Dalam anggaran pendapatan dan belanja negara, pengeluaran pemerintah di Indonesia secara garis besar dikelompokkan atas pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan (Dumairy, 1997).

a. Pengeluaran rutin

Pengeluaran rutin adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai tugas-tugas umum pemerintahan dan kegiatan operasional pemerintah pusat, pembayaran bunga atas utang dalam negeri, pembayaran bunga atas utang

luar negeri, pembayaran subsidi, dan pengeluaran rutin lainnya. (Undang-undang No.19 Tahun 2001).

b. Pengeluaran pembangunan

Pengeluaran pembangunan adalah semua pengeluaran negara untuk membiayai proyek-proyek pembangunan yang dibebankan pada anggaran belanja pemerintah pusat. (Undang-undang No.19 Tahun 2001). Namun pengelompokan di atas hanya berlaku hingga Tahun 2001. Karena dengan adanya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, terjadi perubahan dalam pengelompokkan belanja daerah. Perubahan dalam belanja daerah dikelompokkan menjadi belanja aparatur daerah, belanja pelayanan publik, belanja transfer, dan belanja tidak tersangka.

1) Belanja aparatur daerah

Belanja aparatur daerah adalah belanja yang manfaatnya dirasakan secara langsung oleh aparatur. Belanja aparatur daerah terdiri atas:

- a) Belanja administrasi umum
- b) Belanja operasi dan pemeliharaan
- c) Belanja modal.

2) Belanja pelayanan publik

Belanja pelayanan publik adalah belanja yang manfaatnya tidak dirasakan secara langsung oleh aparatur, tetapi dinikmati secara langsung oleh masyarakat. Belanja pelayanan publik terdiri dari:

- a) Belanja administrasi umum
- b) Belanja operasi dan pelayanan umum
- c) Belanja modal

3) Belanja transfer

Pengeluaran transfer adalah pengalihan uang dari pemerintah daerah, dengan kriteria:

- a) Tidak menerima secara langsung imbalan barang dan jasa seperti layaknya terjadi transaksi pembelian dan penjualan
- b) Tidak mengharapkan dibayar kembali di masa yang akan datang, seperti yang diharapkan pada suatu pinjaman
- c) Tidak mengharapkan adanya hasil pendapatan, seperti layaknya yang diharapkan pada suatu investasi.

4) Belanja tidak terduga.

Pengeluaran tidak terduga adalah pengeluaran yang disediakan untuk pembiayaan:

- a) Kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam, kejadian yang dapat membahayakan daerah
- b) Tagihan tahun lalu yang belum diselesaikan dan/atau tidak tersedia anggarannya pada tahun yang bersangkutan
- c) Pengambilan penerimaan yang bukan haknya atau penerimaan yang dibebaskan (dibatalkan) dan/atau kelebihan penerimaan.

Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah (Provinsi ataupun kabupaten/ kota) yang meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Sesuai Permendagri nomor 13 tahun 2006 telah ditentukan bahwa struktur belanja terdiri dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung meliputi : belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, bantuan sosial, belanja

bagi hasil, bantuan keuangan dan belanja tidak terduga. Sedangkan Belanja Langsung meliputi : belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal. Menurut Suparmoko (2000) pengeluaran pemerintah dapat bersifat “*exhaustive*” yaitu merupakan pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lain.

Di samping itu pengeluaran pemerintah juga dapat bersifat “*transfer*” saja yaitu berupa pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi atau mungkin pula kepada negara lain sebagai hadiah (*grants*). Menurut Mahmudi(2007), pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan penyelenggara pelayanan publik adalah instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Sedangkan pelayanan publik yang harus diberikan kepada masyarakat, antara lain: pelayanan kebutuhan dasar, kesehatan, pendidikan, bahan kebutuhan pokok masyarakat, pelayanan umum.

2.5 Klasifikasi Pengeluaran Pemerintah

(Suparmoko, 2000): Pengeluaran pemerintah dibedakan menjadi 2 yaitu: Pengeluaran itu merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa-masa yang akan datang. Pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan bagi masyarakat. Menyediakan kesempatan kerja lebih banyak dan penyebaran tenaga beli yang lebih luas.

Berdasarkan penilaian di atas Suparmoko (2000) membedakan bermacam-macam pengeluaran negara sebagai berikut:

1. Pengeluaran yang “*self-liquidating*” sebagian atau seluruhnya, artinya pengeluaran pemerintah mendapatkan pembayaran kembali dari masyarakat yang menerima jasa-jasa/barang-barang yang bersangkutan. Misalnya pengeluaran untuk jasa-jasa perusahaan negara, atau untuk proyek-proyek produktif barang-barang ekonomi.
2. Proyek yang reproduktif, artinya pengeluaran mewujudkan keuntungan-keuntungan ekonomis bagi masyarakat, dengan naiknya tingkat penghasilan dan sasaran pajak yang lain akhirnya akan meningkatkan penerimaan pemerintah. Misalnya pengeluaran untuk bidang pengairan, pertanian, pendidikan kesehatan masyarakat (*public health*) dan sebagainya.
3. Pengeluaran yang tidak “*self-liquidating*” maupun yang tidak reproduktif, yaitu pengeluaran yang langsung menambah kegembiraan dan kesejahteraan masyarakat misalnya untuk bidang rekreasi, pendirian monumen, obyek-obyek *tourisme* dan sebagainya. Dalam hal ini dapat juga menyebabkan naiknya penghasilan nasional dalam arti jasa-jasa tadi.
4. Pengeluaran yang secara langsung tidak produktif dan merupakan pemborosan misalnya untuk pembiayaan pertahanan perang meskipun pada saat pengeluaran terjadi penghasilan perorangan yang menerimanya akan naik.
5. Pengeluaran yang merupakan penghematan di masa yang akan datang, misalnya pengeluaran untuk anak-anak yatim piatu. Kalau hal ini tidak

dijalankan sekarang, kebutuhan-kebutuhan pemeliharaan bagi mereka di masa yang akan datang pada waktu yang akan datang pasti akan lebih besar.

2.5.1 Teori Makro

Dalam teorinya, Rostow dan Musgrave menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahap-tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi, persentase investasi pemerintah terhadap total investasi besar, menyebabkan pemerintah harus menyediakan prasarana transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi pemerintah tetap diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi agar dapat tinggal landas, namun pada tahap ini peranan investasi swasta sudah semakin membesar (Mangkoesoebroto, 1994). Pada tingkat ekonomi lebih lanjut, Rostow mengatakan dalam (Mangkoesoebroto 1994), bahwa pembangunan ekonomi aktivitas pemerintah beralih dari penyediaan prasarana ke pengeluaran-pengeluaran untuk aktivitas sosial, seperti halnya program kesejahteraan hari tua, program pelayanan kesehatan masyarakat, dan sebagainya.

2.5.2 Teori Mikro

Tujuan dari teori ekonomi mikro mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Interaksi antara permintaan dan penawaran barang untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Jumlah barang publik yang disediakan tersebut akan menimbulkan permintaan akan barang lain.

Anggaran belanja yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas pemerintah. Salah satu aktivitas pemerintah adalah pengeluaran pembangunan dalam berbagai sektor. Pembangunan yang dilaksanakan pemerintah direncanakan dalam perumusan anggaran yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan, karena anggaran tersebut merupakan variabel yang sangat penting dalam pembangunan masyarakat. Alokasi dana pemerintah dalam anggaran (*budget*) yang bertindak sebagai alat pengatur prioritas pembangunan dengan mempertimbangkan tujuan yang ingin dicapai. Oleh karena itu usaha pembangunan harus selalu berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Trilogi Pembangunan (M. Suparmoko, 2000). Melihat perkembangan kegiatan pemerintah dari tahun ke tahun, peranan pemerintah cenderung meningkat. Peningkatan kegiatan pemerintah ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

1. Adanya kenaikan tingkat penghasilan masyarakat, maka kebutuhan masyarakat juga meningkat. Hal ini mengakibatkan meningkatnya kegiatan pemerintah dalam usaha memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut, seperti kebutuhan akan prasarana transportasi, pendidikan, dan kesehatan umum.
2. Perkembangan penduduk, hal ini membutuhkan peningkatan kegiatan pemerintah untuk mengimbangi perkembangan penduduk dalam memenuhi kebutuhan penduduk tersebut.
3. Perkembangan ekonomi, juga dibutuhkan peranan pemerintah yang besar guna mengisi kegiatan ekonomi seperti mengendalikan inflasi.

2.6 UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49 dan UU No 36 tahun 2009 Pasal 171 Tentang Pengalokasian Dana Pendidikan dan Kesehatan

2.6.1 UU No. 20 Tahun 2003 Pasal 49

- (1) Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
- (2) Gaji guru dan dosen yang diangkat oleh Pemerintah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) Dana pendidikan dari Pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dana pendidikan dari Pemerintah kepada pemerintah daerah diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Ketentuan mengenai pengalokasian dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.

2.6.2 UU No 36 tahun 2009 Pasal 171

- (1) Besar anggaran kesehatan Pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji.
- (2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji.

- (3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarnya sekurang kurangnya $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

2.7 Teori Pertumbuhan Ekonomi Menurut Michael P Todaro

Menurut Michael P Todaro (Sadono Sukirnom, 2006), Faktor utama atau komponen pertumbuhan ekonomi dalam suatu masyarakat adalah :

- a. Akumulasi modal
- b. Pertumbuhan penduduk dan angkatan kerja
- c. Kemajuan teknologi

Akumulasi modal terjadi apabila sebagian dari pendapatan ditabung dan diinvestasikan dengan tujuan memperbesar output dan pendapatan dikemudian hari. Dalam hal ini akumulasi modal ini merupakan pendapatan pemerintah, apabila pendapatan pemerintah ini surplus, sehingga sebagian dari surplus itu ditabung dan kemudian diinvestasikan dalam bentuk pengeluaran pemerintah maka akan menghasilkan efek yang lebih besar lagi bagi pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi juga merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang. Untuk aspek pelaksanaan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi dapat dicapai melalui :

1. Peningkatan jumlah persentase belanja pembangunan diharapkan setiap tahun meningkat serta signifikan dari total APBN.
2. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
3. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

4. Meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi.
5. Pengurangan jumlah dan persentase penduduk miskin.
6. Pengurangan jumlah dan persentase pengangguran.
7. Memacu sektor industri dan sektor unggulan lainnya, terutama sektor pariwisata, perdagangan, pertambangan, jasa-jasa dan koperasi.
8. Peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk dapat melayani kepentingan publik secara merata.
9. Peningkatan dan pengembangan investasi, baik investasi pemerintah maupun investasi swasta.
10. Peningkatan kesempatan dan lapangan kerja.

Menurut Michael Todaro (Sadono Sukirno, 2006), dalam mencapai pertumbuhan dan perbaikan yang ingin dicapai, beberapa kendala yang mungkin menjadi penghambat adalah :

1. Kemiskinan dan Pengangguran.

Kemiskinan dan pengangguran menjadi salah satu penyebab rendahnya kualitas sumber daya manusia dan produktifitas kerja serta tumbuhnya sikap yang apatis terhadap proses dan hasil-hasil pembangunan yang akan dicapai.

2. Rendahnya Kualitas Sumber Daya Manusia.

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan salah satu kendala pembangunan yang paling penting, sebagian besar penduduk dunia masuk kerja dengan pendidikan SD dan SLTP, serta sering tanpa disertai keterampilan khusus. Dari segi pendidikan sekolah, angka partisipasi murni (APM) untuk pendidikan dasar, dan menengah masih sangat rendah.

3. Lambatnya Pemulihan Ekonomi Daerah.

Pemulihan ekonomi daerah akibat krisis moneter dan ekonomi telah berakibat pertumbuhan ekonomi daerah mengalami pertumbuhan yang negatif dan saat ini sudah mulai membaik. Belum pulihnya perekonomian disebabkan juga akibat belum banyaknya investasi yang masuk dari luar daerah.

4. Minimnya pendapatan Asli Daerah.

Pendapatan Asli Daerah yang diterima oleh pemerintah daerah akan sangat mempengaruhi proses pembiayaan pembangunan yang harus dikerjakan. Apabila PAD meningkat maka persentase belanja pemerintah akan meningkat dan mempermudah proses pembangunan sehingga akan memaksimalkan pertumbuhan ekonomi.

2.8 Pembangunan Ekonomi: Tindakan-Tindakan Domestik

Ada beberapa tindakan-tindakan domestik yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, (M.L. Jhingan, 2004) antara lain :

1. Pembentukan modal dan pembangunan ekonomi
2. Pengangguran tersembunyi sebagai potensi tabungan
3. Peranan pertanian di dalam pembangunan ekonomi
4. Kebijakan moneter dalam pembangunan ekonomi
5. Kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi
6. Keuangan defisit sebagai piranti pembangunan ekonomi
7. Kebijakan harga dalam pembangunan ekonomi
8. Pertumbuhan penduduk dalam pembangunan ekonomi
9. Pembentukan modal manusia
10. Kewiraswastaan dalam pembangunan ekonomi
11. Peranan pemerintah dalam pembangunan ekonomi.

Fokus penelitian ini adalah mengenai pembentukan modal manusia. Gagasan investasi pada modal manusia adalah benar-benar baru. Dalam proses pertumbuhan ekonomi, lazimnya orang lebih menekankan arti penting akumulasi modal fisik. Sekarang semakin disadari bahwa pertumbuhan persediaan modal nyata sampai batas-batas tertentu tergantung pada pembentukan modal manusia, yaitu “ proses peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan seluruh rakyat suatu negara”. Studi yang diadakan Schultz, Harbison, Denison, Kendrick, Moses Abramovits, Becker, Mary Bowman, Kuznets, dan sekelompok ahli ekonomi lainnya menyatakan bahwa salah satu dari beberapa faktor penting yang menyebabkan pertumbuhan cepat perekonomian Amerika adalah pembiayaan pendidikan yang secara relatif selalu meningkat (M.L. Jhingan, 2004).

Menurut Schultz (2005), ada lima cara pengembangan sumber daya manusia, antara lain : 1) Fasilitas dan pelayanan kesehatan, pada umumnya diartikan mencakup semua pengeluaran yang mempengaruhi harapan hidup, kekuatan dan stamina, tenaga dan vitalitas rakyat; 2) latihan jabatan, termasuk magang model lama yang diorganisasikan oleh perusahaan; 3) pendidikan yang diorganisasikan pada tingkat dasar, menengah, dan tinggi; 4) program studi bagi orang dewasa yang tidak diorganisasikan oleh perusahaan, termasuk program ekstension khususnya pada pertanian; 5) Migrasi perorangan dan keluarga untuk menyesuaikan diri dengan kesempatan kerja yang selalu berubah. (M.L. Jhingan, 2004).

2.9 Model Human Capital dan Pertumbuhan

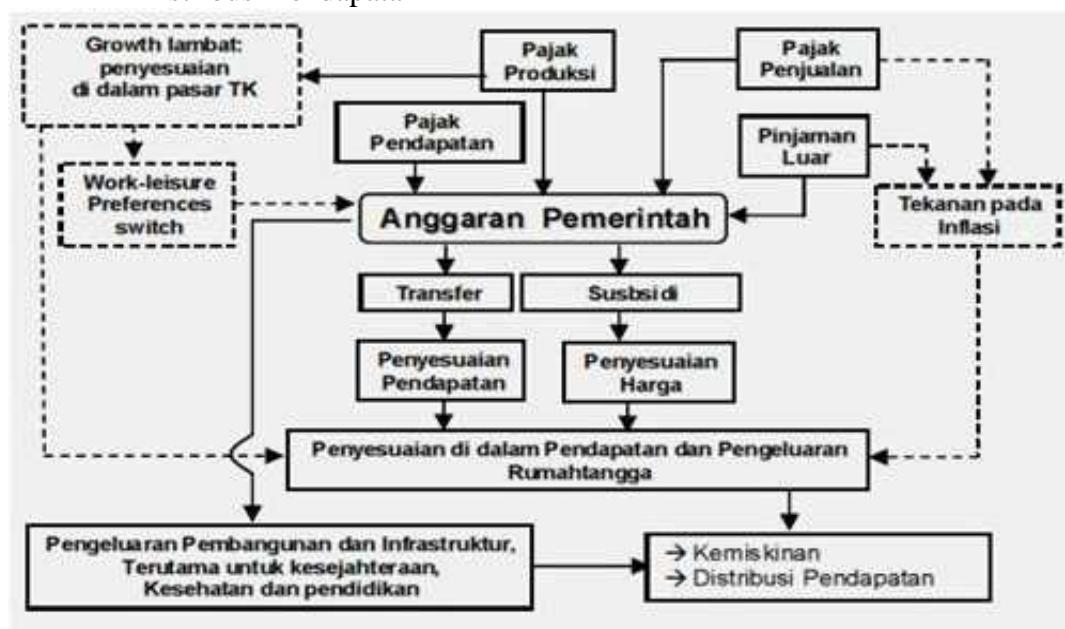
Model ini merupakan pengembangan dari model Solow, dimana fungsi produksi adalah (Romer, 1996) : $Y(t) = K(t) H(t) [A(t)L(t)]^{1-\alpha}$

Persamaan diatas menyatakan bahwa $Y(t)$ output suatu perekonomian merupakan fungsi dari $K(t)$ Kapital, $H(t)$ Modal Manusia, $A(t)$ Teknologi dan $L(t)$ Tenaga Kerja. Menurut Park (1995), modal manusia dapat diartikan sebagai spesialisasi keahlian yang disediakan tenaga kerja dan dapat diperoleh dengan mengalokasikan pendapatan untuk pendidikan dan kesehatan.

2.10 Mekanisme Transmisi Investasi Publik

Mekanisme transmisi investasi publik untuk mempengaruhi distribusi pendapatan dan kemiskinan di tampilkan pada Gambar 2,

Gambar 2. Mekanisme Transmisi Investasi Publik Untuk Mempengaruhi Distribusi Pendapatan



Sumber: Rasidin K. Sitepu dan Bonar M. Sinaga, 2005.

Dari sisi pengeluaran, penurunan kemiskinan dan redistribusi pendapatan dapat dilakukan dengan tiga instrumen alokasi anggaran pemerintah, yaitu (1) subsidi langsung atau subsidi individu yang ditargetkan pada rumah tangga berpendapatan rendah, (2) subsidi harga, subsidi komoditi yang digunakan oleh rumah tangga terutama untuk kebutuhan pokok, dan (3) pengeluaran langsung pemerintah terhadap pelayanan publik dan infrastruktur, terutama pada sektor kesejahteraan, kesehatan dan pendidikan, yang diutamakan untuk rumah tangga berpendapatan rendah.

Fokus studi ini pada instrumen fiskal pengeluaran pemerintah untuk pendidikan dan kesehatan. Dari sisi penerimaan, pembiayaan dapat bersumber dari domestik berupa pajak atau pinjaman luar negeri.

2.10.1 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Pada Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Pengeluaran Pemerintah pada sektor pendidikan dan kesehatan merupakan komposisi yang diperlukan dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Pengeluaran pada kedua sektor ini dilakukan pemerintah agar dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pengembangan Manusia (IPM). Sumber daya manusia yang berkualitas akan mampu mendorong pembangunan ekonomi kearah yang lebih maju, sehingga pada akhirnya pembangunan ekonomi yang maju tersebut akan dapat mengurangi jumlah kemiskinan dan melepaskan masyarakat miskin dari jeratan kemiskinan. (Adi Widodo, et al, 2011)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini diperoleh langsung dari Badan Pusat Statistik (BPS), Departemen Perimbangan Keuangan Daerah, susenas dan instansi lain yang terkait, berupa data (*time series*) selama 20 tahun, dari Tahun 1994 - 2013.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Selain mendapatkan data dari beberapa instansi, penelitian ini juga dilakukan dengan melakukan penelitian kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca dan memahami melalui buku-buku, jurnal penelitian, literatur, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

3.3 Variabel Penelitian

- a. Variabel *Independen* atau Variabel Bebas.

Dalam penelitian ini variabel *independent* yang digunakan sebagai berikut :

PPSP : Realisasi Penjumlahan Pengeluaran Pemerintah Daerah sektor pendidikan Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota di Lampung (Ratus Ribu Rupiah).

PPSK : Realisasi Penjumlahan Pengeluaran Pemerintah Daerah sektor kesehatan Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota di Lampung (Ratus Ribu Rupiah).

b. Variabel *Dependen* atau Variabel Terikat

POV : Jumlah Penduduk miskin di Provinsi Lampung (Ratus Jiwa).

3.4 Model Analisis

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Metode ini menjelaskan kedudukan variabel-variabel penelitian yang diteliti serta pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Model analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier, yaitu suatu bentuk analisis untuk mengetahui pengaruh antara variabel-variabel bebas dan variabel terikat. Untuk menguji hipotesis digunakan model persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$POV = + IPPSP_{(t-6)} + 2PPSK + et$$

Dimana :

POV : Tingkat Kemiskinan di Provinsi Lampung (Ratus Jiwa Tahun 1999-2013)

: Konstanta

PPSP_(t-6) : Realisasi Penjumlahan Pengeluaran Pemerintah Daerah sektor pendidikan Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten di Lampung (Ratus Ribu Rupiah).

PPSK : Realisasi Penjumlahan Pengeluaran Pemerintah Daerah sektor kesehatan Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten di Lampung (Ratus Ribu Rupiah).

1; 2 : Koefisien Regresi

et : Variabel Pengganggu

Dampak sebuah kebijakan ekonomi seperti kebijakan moneter, fiskal biasanya tidak secara langsung berdampak pada aktifitas ekonomi tetapi memerlukan waktu atau kelambanan (*lag*). Model regresi yang memasukkan tidak hanya nilai sekarang (*current*) tetapi juga nilai kelambanan (*lag*) dari variabel independent disebut model kelambanan (Agus Widarjono, 2013).

Berdasarkan hasil linier berganda maka fungsi elastisitas regresi adalah sebagai berikut:

$$\text{ELASTISITAS PPSK} = \frac{\frac{1}{n} \sum \text{PPSK}}{\frac{1}{n} \sum \text{POV}} \cdot 1 = \frac{\bar{x} \text{ PPSK}}{\bar{x} \text{ POV}}$$

$$\text{ELASTISITAS PPSP}(t-6) = \frac{\frac{1}{n} \sum \text{PPSP}(t-6)}{\frac{1}{n} \sum \text{POV}} \cdot 1 = \frac{\bar{x} \text{ PPSP}(t-6)}{\bar{x} \text{ POV}}$$

Dimana:

$\bar{x}PO$: Rata-rata Tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung
(Ratus Jiwa Tahun 1999-2013)

: Konstanta

$\bar{x}PPSP(t-6)$: Rata-rata realisasi Penjumlahan Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota Lampung (Ratus Ribu Rupiah Tahun 1994-2013)

\bar{X}_{PPSK} : Rata-rata realisasi Penjumlahan Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Provinsi Lampung dan seluruh kabupaten/kota Lampung (Ratus Ribu Rupiah Tahun 1994-2013)

1; 2 : Koefisien Regresi

et : Variabel Pengganggu

3.5 Metode Analisis

Metode analisis menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui keterkaitan antara variabel yang digunakan dan untuk mengetahui respon setiap variabel, berupa persamaan tunggal (*single equation*). Maka dibutuhkan pengujian-pengujian.

3.5.1 Pengujian Asumsi Klasik

Untuk mendapatkan model yang tidak bias (*unbiased*) dalam memprediksi masalah yang diteliti, maka model tersebut harus bebas uji asumsi klasik yaitu :

3.5.1.1 Uji Normalitas

Pengujian normalitas data adalah untuk mengetahui apakah model statistik variabel-variabel penelitian mempunyai distribusi data yang normal atau tidak normal. Proses uji normalitas data dilakukan dengan memperhatikan penyebaran data (titik-titik) pada *Normal P-Plot Of Regression Standardzed Residual* dari variabel independen, dimana :

1. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

2. Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti garis diagonal maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas, uji normalitas data menggunakan uji *kolmogorov-smirnov*. Distribusi data dapat dilihat dengan membandingkan Z hitung dengan Z tabel. Dengan kriteria sebagai berikut :

- Jika angka signifikan > taraf signifikan () 0,05 maka distribusi data dikatakan normal.
- Jika angka signifikan < taraf signifikan () 0,05 maka distribusi dikatakan tidak normal. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. (Gujarati, 2012).

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah nilai residual atau *error term* dalam suatu model regresi berdistribusi secara normal atau tidak. Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan *normal probability plots* dan uji Jarque-Bera. Cara untuk mendeteksi apakah nilai residual dari model regresi berdistribusi normal atau tidak, dengan melihat nilai probabilitas dari statistik jarque-Bera. Jika nilai Probabilitas statistik jarque-Bera lebih besar dari 0,05 maka diputuskan untuk menerima hipotesis bahwa residual berdistribusi normal, sebaliknya jika kita menolak hipotesis tersebut.(Arief Daryanto et al, 2010)

3.5.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Dalam regresi linear berganda, salah satu asumsi yang harus dipenuhi agar taksiran parameter dalam model tersebut BLUE adalah $\text{var}(u_i) = \sigma^2$ (konstan), semua *error* mempunyai variasi yang sama. Pada umumnya, heteroskedastisitas diperoleh pada data *cross section*. Jika pada model dijumpai heteroskedastisitas, maka akan membuat varians residual dari variabel tidak konstan (tidak

homoskedastisitas), sehingga menyebabkan model menjadi tidak efisien meskipun tidak bias dan konsisten. Dengan kata lain, jika regresi tetap dilakukan meskipun ada masalah heteroskedastisitas, maka hasil regresi akan menjadi *misleading*. (Gujarati, 2012).

Untuk menguji adanya pelanggaran asumsi heteroskedastisitas, digunakan uji *white heteroskedasticity* yang diperoleh dalam program E-views. Uji *white heteroskedasticity* dilakukan dengan membandingkan $\text{Obs} \times R\text{-Square}$ dengan χ^2 (*Chi-Square*) tabel. Jika nilai $\text{Obs} \times R\text{-Square}$ lebih kecil dari χ^2 tabel, maka tidak ada heteroskedastisitas pada model. Dalam pengolahan data panel dengan E-views 7, dapat digunakan metode *General Least Square (cross section weight)*, dan untuk mendeteksi heteroskedastisitas dilakukan dengan cara membandingkan *Sum Square Resid* pada *weighted statistics* dengan *Sum Square Resid unweighted statistics*. Jika *Sum Square Resid* pada *weighted statistics* lebih kecil dari *Sum Square Resid unweighted statistics*, maka terjadi heteroskedastisitas. Perlakuan untuk pelanggaran tersebut adalah dengan mengestimasi GLS menggunakan *White Heteroskedasticity*. (Gujarati, 2012).

3.5.1.3 Uji Multikolinieritas

Multikolinieritas adalah situasi dimana terdapat korelasi variabel bebas antara satu variabel dengan variabel yang lainnya. Untuk melihat apakah ada masalah multikolinieritas dalam penelitian ini digunakan pengujian *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*, dengan melihat nilai dari *Variance Inflation Factor (VIF)*. Nilai *VIF* yang diperkenankan adalah 10, jika nilai *VIF* lebih dari 10 maka dapat dikatakan terjadi multikolinieritas, yaitu terjadi hubungan yang cukup besar antara variabel-variabel bebas, dan angka *tolerance* mempunyai angka $>0,10$

maka variabel tersebut tidak mempunyai masalah multikolonieritas dengan variabel bebas lainnya. Dalam model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel bebas atau masalah multikolonieritas. (Gujarati, 2012).

3.5.1.4 Uji Autokorelasi

Suatu keadaan dimana tidak adanya korelasi antar variabel pengganggu *disturbance term* disebut dengan autokorelasi (Gujarati,2012). Konsekuensi dari adanya gejala *autokorelasi* adalah estimator OLS menjadi tidak efisien karena selang keyakinan melebar.

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linier ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk melengkapi kekurangan uji DW dan mendiagnosis adanya autokorelasi dalam model. Penulis menggunakan metode *Breusch-Godfrey*.

Jika nR^2 yang merupakan *chi-square* (χ^2) hitung lebih besar dari nilai *kritis chi-squares tabel* (χ^2) pada derajat kepercayaan tertentu (α), kita menolak hipotesa nol H_0 . Ini menunjukkan adanya masalah autokorelasi dalam model. Sebaliknya jika nilai *chi-squares* hitung lebih kecil dari nilai kritisnya maka kita gagal menolak (menerima) hipotesis nol. Artinya model ini tidak mengandung unsur *autokerlasi*. (Agus Widarjono, 2013)

Penentuan ada tidaknya masalah autokoralasi juga bisa dilihat dari nilai probabilitas *chi-Squares* (χ^2). Jika nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 (untuk level 5%) atau 0,01 (untuk level 1%) maka diputuskan untuk menerima hipotesa nol (tidak ada serial korelasi/autokorelasi). (Arief Daryanto at al, 2010)

3.6 Pengujian Hipotesis

3.6.1. Pengujian Statistik T

Menurut Ghozali (2007) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0.05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut :

Hipotesa pada pengujian ini adalah :

H_0 : $\beta_i = 0$, Semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : $\beta_i \neq 0$, Semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

- Jika nilai t-hitung > nilai t-tabel maka H_0 ditolak atau menerima H_a
- Jika nilai t-hitung < nilai t-tabel maka H_0 diterima atau menolak H_a

Ini berarti secara individual variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

3.6.2. Pengujian Statistik F

Menurut Gujarati (2012) uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen, atau untuk mengukur pengaruh semua variabel bebas sebagai satu kesatuan. Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.

Berikut ini adalah langkah-langkah dalam uji-F statistik pada tingkat kepercayaan 95% dengan derajat kebebasan $df_1 = (k-1)$ dan $df_2 = (n-k)$:

Hipotesa pada pengujian ini adalah :

H_0 : $\beta_i = 0$, Semua variabel independen secara bersama-sama tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

H_1 : $\beta_i \neq 0$, Semua variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan F-statistik dengan kriteria pengambilan keputusan membandingkan nilai F-hitung dengan nilai F-tabel.

- Jika F-hitung > F-tabel, maka H_0 ditolak
- Jika F-hitung < F-tabel, maka H_0 diterima

3.6.3. Penafsiran Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R^2) yaitu angka yang menunjukkan besarnya derajat kemampuan menerangkan variabel bebas terhadap variabel terikat dari fungsi tersebut. Koefisien determinasi sebagai alat ukur kebaikan dari persamaan regresi yaitu memberikan proporsi atau persentase variasi total dalam variabel tidak bebas Y yang dijelaskan variabel bebas y.

Koefisien determinasi berfungsi untuk menunjukkan seberapa baik model yang diperoleh sesuai dengan data aktual (*goodness of fit*), mengukur berapa persentase variasi dalam peubah terikat mampu dijelaskan oleh informasi peubah bebas.

Kisaran nilai koefisien determinasi adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. dengan ketentuan (Gujarati, 2004), yaitu:

- Model dikatakan semakin baik apabila nilai R^2 mendekati 1 atau 100 persen.
- Model dikatakan kurang baik apabila nilai R^2 menjauh dari angka 1.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai analisis pengaruh pengeluaran pemerintah Propinsi Lampung terhadap kemiskinan di Propinsi Lampung, dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Pengeluaran pemerintah Propinsi dan seluruh kabupaten Lampung sektor pendidikan (*ppsp*) berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan di Propinsi Lampung dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,00127 dan berdasarkan hasil perhitungan, elastisitas didapat -0,0305 Hal ini berarti setiap peningkatan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan Provinsi Lampung naik 1 peren maka akan mengurangi kemiskinan sebesar di Provinsi Lampung 0,0305 persen (*ceteris paribus*).
2. Pengeluaran pemerintah Propinsi dan seluruh kabupaten Lampung sektor kesehatan (*PPSK*) berpengaruh secara signifikan terhadap penurunan jumlah kemiskinan di Propinsi Lampung (*Poverty*) dengan nilai koefisien regresi sebesar -0,00179, Variabel pengeluaran pemerintah daerah Provinsi Lampung sektor kesehatan (*PPSK*), mempunyai koefisien regresi sebesar -0.00179 dan berdasarkan hasil perhitungan, elastisitas didapat -0,0352(*in elastic*) Hal ini berarti setiap peningkatan pengeluaran

3. pemerintah sektor pendidikan Provinsi Lampung naik 1 persen maka akan mengurangi kemiskinan di Provinsi Lampung sebesar 0,0352 persen (*ceteris paribus*).
4. Berdasarkan penelitian kita memperoleh nilai F-statistik sebesar 109.6217. Nilai F-statistik ini lebih besar dibandingkan nilai F-tabel pada tingkat signifikansi (α) 5 persen, sehingga H_0 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (PPSP), dan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (PPSK) secara bersama-sama berpengaruh terhadap jumlah penduduk miskin Propinsi Lampung.

5.2 Saran

Beberapa saran yang dapat penulis sampaikan dan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan, antara lain:

1. Sebaiknya pemerintah Propinsi Lampung terus menggali sumber-sumber dana untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang maksimal, agar pemerintah Propinsi Lampung tidak mengalami kesulitan finansial sehingga pemerintah Propinsi Lampung dapat terus memperbesar pengeluarannya yang diperlukan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pengeluaran pada sektor pendidikan dan kesehatan.
2. Sebaiknya pemerintah Propinsi Lampung lebih mengutamakan pengeluaran pada sektor kesehatan, karena pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan ini menunjukkan pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan sektor pendidikan. Tentunya dengan tidak mengabaikan pengeluaran pada sektor pendidikan, karena pengeluaran pada sektor pendidikan yang digunakan

untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia ini membutuhkan waktu kembali yang cukup lama. Pengaruh pengeluaran pada sektor pendidikan ini akan mampu memberikan dampak yang lebih besar dalam waktu 10-15 tahun yang akan datang dari pengeluaran yang telah dikeluarkan sekarang. Sebaiknya pemerintah membuat program-program yang tepat untuk mengurangi kemiskinan.

3. Sebaiknya lakukan lagi penelitian mengenai faktor-faktor lain diluar model yang mempengaruhi jumlah penduduk miskin di Propinsi Lampung, sehingga apabila telah diketahui pengaruh dari faktor-faktor lainnya diluar model penelitian ini maka dapat dibuat dan diterapkan kebijakan yang lebih efektif, efisien, dan berkesinambungan satu sama lain dari berbagai faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Propinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Adler Haymans Manurung 1991. *Ketimpangan Spasial dan Kemiskinan di Indonesia*, Jakarta, Buletin Ilmiah Tarumanegara, Th. 6 No. 21, Untar.
- Asghar Nabeela, Hussain Zakir, Ur Rehman Hafeez. 2012. *The impact of government spending on poverty reduction: Evidence from Pakistan 1972 to 2008*. African Journal of Business Management Vol. 6(3), pp. 845-853, January. Academic journal.
- Badan Pusat Statistik. 2008. *Analisis dan Perhitungan Tingkat Kemiskinan Tahun 2008*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2009. *Data dan Informasi Kemiskinan Nasional*. BPS. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik, Lampung dalam angka 2013
-----, Lampung dalam angka 2012
-----, Lampung dalam angka 2011
-----, Lampung dalam angka 2010
-----, Lampung dalam angka 2009
-----, Lampung dalam angka 2008
-----, Lampung dalam angka 2007
-----, Lampung dalam angka 2006
-----, Indikator Kesejahteraan Rakyat Lampung 2012
-----, Panduan Keluarga Sejahtera 1996
- Bappenas, BPS, UNDP. 2005. *Laporan Pembangunan Manusia Indonesia 2004*. BPS, Jakarta.

- Bappenas, UNDP. 2008. *Studi Evaluasi Dampak Pemekaran Daerah 2001-2007*. Jakarta: Bridge (Building and Reinventing Decentralised Governance).
- Brata, Aloysius Gunadi. 2005. *Investasi Sektor Publik Lokal, Pembangunan Manusia, dan Kemiskinan*. Lembaga Penelitian – Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Boediono, 1993, *Teori Pertumbuhan Ekonomi*, Seri Sinopsis Pengantar Ilmu Ekonomi, Edisi 1, Cetakan Ke 5, BPFE, Yogyakarta
- Cahyat. A. 2004. *Bagaimana Kemiskinan Diukur? Beberapa Model Perhitungan Kemiskinan di Indonesia*. Poverty & Decentralization Project CIFOR (Center for International Forestry Research). Jakarta.
- Craigwell Roland, Bynoe Danielle, Lowe Shane. 2012. *The effectiveness of government expenditure on education and health care in the Caribbean*. International Journal of Development Issues, Vol. 11 Iss: 1 pp. 4 – 18. Emerald.
- Departemen Keuangan RI. *Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan dan Kesehatan*. <http://www.djpk.depkeu.go.id>.
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Daryanto, Arief. 2010. *Model-Model Kuantitatif Untuk Perencanaan Keuangan Daerah*. PT Penerbit IPB Press. Bogor.
- F Joseph Stepanek., “Chronic Poverty in the United States.” *J. Human Res.* **28**, 1:25–54, Winter 1985.
- Gujarati Damodar. 2006. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 1*, Erlangga. Jakarta.
- Gujarati Damodar. 2004. *Dasar-Dasar Ekonometrika Jilid 1*, Erlangga. Jakarta.
- Gujarati Damodar. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika buku 1*, Erlangga. Jakarta.
- Gujarati Damodar. 2012. *Dasar-Dasar Ekonometrika buku 2*, Erlangga. Jakarta.
- Gupta Sanjeev, Verhoeven Marijn, R. Tiongson Erwin. 2001. *The effectiveness of government spending on education and health care in developing and transition economies*. European Journal of Political Economy. Vol. 18 (2002) 717–737. Elsevier.
- Ghozali, Imam. 2007. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. BPUNDIP. Semarang.
- Irawan. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif Untuk Ilmu-ilmu Sosial*. Departemen Ilmu Administrasi. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia. Jakarta

- Jhingan M.L. 2004. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*, PT Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- JhaRaghbendra, ANU, Canberra.2001.*An Empirical Analysis of the Impact of Public Expenditures on Education and Health on Poverty in Indian States*.*Journal of Economic Studies*. Kingston University,Canada.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002, Terjadi Perubahan Dalam Pengelompokkan Belanja Daerah.
- Kuncoro, Mudrajat. 2004. *Ekonomi Pembangunan Teori, Masalah, Dan Kebijakan*. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- Lipsey, Richard. G. 1992. “*Pengantar Makro Ekonomi Edisi 8*”. Erlangga.Jakarta.
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. UPP STIM YKPN.Yogyakarta.
- Mangkoesoebroto, Guritno.1994. *Ekonomi Publik*, BPFE. Yogyakarta.
- Mceachern, William A.2000.*Ekonomi Makro, Edisi Pertama*, Salemba Emapt.Jakarta.
- Musgrave, Richard. A. 1993. “*Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek Edisi 5*”. Erlangga.Jakarta,
- Mulyaningsih, Yani. 2006. *Pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor publik terhadap peningkatan pembangunan manusia dan pengurangan kemiskinan*. Abstrak Tesis.www.digilib.ui.ac.id.
- Park,I.1995. *Regional Integration Amongthe ASEAN Nations: AComputable General Equilibrium Model Study*.Pareger.Westport.
- Permendagri nomor 13 tahun 2006.
- Ravallion, Martin.1998. *Poverty Comparisons*. World Bank. New York.
- Romer, Paulm M.1996. Increasing Returns and Long-Run Growth. *Journal of Political Economy*.94(5). October. 1002-1037.
- Quang Dao,Minh.2008, *Human capital, poverty, and income distribution in developing countries*. *Journal of Economic Studies*, Vol. 35 Iss: 4 pp. 294 – 303.Emerald.
- Schultz, D.P.2005. *Theories Of Personality*, Thomson. Australia.
- Sitepu, Rasidin K. Bonar M Sinaga. 2005. *Dampak Investasi Sumberdaya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di*

Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium.
Jurnal Ekonomi. IPB.

- Soetrisno. 1984. *Kemiskinan, PerempuandanPemberdayaan.*Kanisius.Jakarta.
- Suyanto. 1995.*PerspektifKemiskinan.* Yogyakarta: AdicitaKarya Nusa.
- Sudarsono.1986.Pengantar Ekonomi Mikro.LP3ES.
- Soediyono. 1992. “*Ekonomi Makro: Pengantar Analisis Pendapatan Nasional Edisis 5*”. Liberty, Jogjakarta.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan ; Proses, Masalah, dan Dasar Kebijakan.* Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Suparmoko, M. 1999. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik.* BEFE. Yogyakarta. Tambunan, Tulus T.H.1996. *Perekonomian Indonesia.* Ghalia Indonesia.Jakarta.
- Suparmoko. 2000. “*Keuangan Negara Dalam Teori Dan Praktek Edisi 4*”. BPFE, Yogyakarta.
- Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di DuniaKetiga.*Edisi ke-7 (TerjemahanBahasa Indonesia). PT Erlangga .Jakarta..
- UU No 19 Tahun 2001 TentangPengeluaran Pembangunan
- UU No 19 Tahun 2001 TentangPengeluaranPengalokasian Dana Pendidikandan Dana Kesehatan
- UU No 36 Tahun 2009 TentangKesehatan
- UNDP.1990.Human Development Report.
- Usman, S. 2004. *Pembangunan danPemberdayaanMasyarakat.* PustakaBelajar. Yogyakarta.
- Widarjono, Agus.2013.*EkonometrikaPengantardanAplikasinya.* UPP STIM YKPN.Yogyakarta.
- WidodoAdi, Waridin, dan Maria K Johanna.2011.
*AnalisisPengeluaranPemerintahSektorPendidikandanKesehatanTerhadapPengentasanKemiskinanMelaluiPeningkatan Pembangunan Manusia Di ProvinsiJawaTengah.*Juli.JurnalEkonomiPembangunan, Volume 1.No1.Yogyakarta.
- Wignjosoebroto Soetandyo, 2008. *Hukum dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah, Kajian Sosiologi.* Bayumedia.Malang

World bank.2003. East Asia Urban Working Paper Series, *Kota-Kota Dalam Transmisi: Tinjauan Sektor Perkotaan Pada era Desentralisasi di Indonesia*. Urban Sector Development Unit Infrastructure Departement East Asia and Pacific Region The World Bank. Jakarta.